BAB. I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kalimantan Timur merupakan provinsi terluas di Indonesia, dengan luas wilayah kurang lebih 245.237,80 Km² atau sekitar satu setengah kali Pulau Jawa dan Madura atau 11% dari total luas wilayah Indonesia. Kalimantan Timur memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik berupa pertambangan seperti emas, batubara, minyak dan gas bumi, juga hasil-hasil hutan yang melimpah serta potensi perikanan dan perkebunannya yang sangat besar.

Letak Geografis :

Wilayah Kalimantan Timur dengan luas mencapai 245.237,80 km² atau satu setengah kali pulau Jawa dan Madura (11% dari total luas wilayah Indonesia), sebagian besar merupakan daratan yakni 20.039.500 Ha. (81,71%), sedangkan lautan hanya 4.484.280 Ha. (18,29%). Daerah yang terkenal sebagai gudang kayu ini mempunyai ratusan sungai yang tersebar di hampir semua Kabupaten dan Kota dengan sungai terpanjang Sungai Mahakam.

Batas wilayah provinsi yang menjadi pintu gerbang utama pembangunan Indonesia dibagian timur ini adalah meliputi :

Utara	:	Negara Bagian Sabah (Malaysia Timur).
Timur	:	Selat Makasar, Laut Sulawesi dan Selat Sulawesi.
Selatan	:	Kalimantan Selatan.
Barat	:	Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat dan Negara Bagian Serawak (Malaysia Timur).

Ibukota provinsi Kalimantan Timur adalah Samarinda yang terletak di tepi Sungai Mahakam. Samarinda dapat dicapai lewat darat dan udara, meskipun harus transit di Kota Balikpapan yang merupakan tempat beradanya Bandara Internasional Sepinggan kemudian dilanjutkan dengan menempuh jalan darat selama ± 2,5 jam atau melalui jalur udara menuju Bandara Temindung yang berada di pusat kota Samarinda.

Pembentukan Provinsi Kalimantan Timur

Daerah-daerah Tingkat II di dalam wilayah Kalimantan Timur, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 27 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1955 No.9).
Lembaran Negara No.72 Tahun 1959 terdiri atas :

- Pembentukan 2 kotamadya, yaitu :
  1. Kotamadya Samarinda dengan Kota Samarinda sebagai ibukotanya dan sekaligus sebagai ibukota Provinsi Kalimantan Timur.
  2. Kotamadya Balikpapan dengan kota Balikpapan sebagai ibukotanya dan merupakan pintu gerbang Kalimantan Timur.
- Pembentukan 4 kabupaten, yaitu:
  1. Kabupaten Kutai dengan ibukotanya Tenggarong
  2. Kabupaten Pasir dengan ibukotanya Tanah Grogot
  3. Kabupaten Berau dengan ibukotanya Tanjung Redeb
  4. Kabupaten Bulungan dengan ibukotanya Tanjung Selor

Pembentukan Kota dan Kabupaten Baru

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1981, maka dibentuk Kota Administratif Bontang di wilayah Kabupaten Kutai dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1989, maka dibentuk pula Kota Madya Tarakan di wilayah Kabupaten Bulungan. Dalam Perkembangan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah, maka dibentuk 4 kabupaten dan 1 peningkatan kota, yaitu:

1. Kabupaten Kutai Barat dengan ibukota berada di Sendawar
2. Kabupaten Kutai Timur dengan ibukota berada di Sangatta
3. Kabupaten Malinau dengan ibukota berada di Malinau
4. Kabupaten Nunukan dengan ibukota berada di Nunukan
5. Kota Bontang (peningkatan kota administratif Bontang menjadi kotamadya)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2002, maka Kabupaten Pasir mengalami pemekaran dan pemekarannya bernama Kabupaten Penajam Paser Utara. Pada tanggal 17 Juli 2007, DPR RI sepakat menyetujui berdirinya Tana Tidung sebagai Kabupaten baru di Kalimantan Timur dengan ibukota bernama tidung pale, maka jumlah keseluruhan kabupaten/kota di Kalimantan Timur menjadi 14 wilayah dan pada tahun yang sama, nama Kabupaten Pasir berubah menjadi Kabupaten Paser berdasarkan PP No. 49 Tahun 2007.

Sekilas Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Perkembangan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai sejarah yang cukup panjang, yaitu dimulai dengan dibentuknya Kantor Karet Cabang Kalimantan Timur pada tahun 1952 dan Yayasan Karet Kalimantan Timur (cabang Kalimantan Selatan) pada tahun 1957. Kedua lembaga ini kemudian digabung menjadi Dinas Karet pada tahun 1963 dan memasuki awal Pelita I (April 1969) Dinas Karet diubah namanya menjadi Dinas Perkebunan Rakyat Kalimantan Timur. Pada perkembangan selanjutnya melalui Perda Nomor 06 tahun 1978 yang disempurnakan lagi dengan Perda Nomor 06 tahun 1984 menjadi Dinas Perkebunan Provinsi Dati I Kalimantan Timur. Melalui Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 03 dan Nomor 16 tahun 2001 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur kembali mengalami perubahan. Kemudian struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur disempurnakan melalui Perda Nomor 04 tahun 2003 dan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 03 tahun 2004.

Dinas Perkebunan merupakan unsur pelaksana daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Provinsi, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur nomor 08 tahun 2004 tentang pembentukan susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas lingkup Provinsi Kalimantan Timur.

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menetapkan Rencana Strategis (RENSTRA) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan, dimana dalam penyusunannya mengacu pada RENSTRA Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang saat ini memasuki tahun ke 2 (dua). Untuk lebih terarahnya pelaksanaan program pembangunan perkebunan di Provinsi Kalimantan Timur ke depan telah dibuat Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2009 – 2013, dimana target-target yang ingin dicapai setiap tahunnya telah dijabarkan kedalam berbagai bentuk kegiatan baik yang bersumber dana melalui APBN maupun APBD I yang mana dari tahun ke tahun telah mengalami peningkatan yang cukup berarti khususnya dalam merealisasikan pelaksanaan pembangunan perkebunan tersebut.

Pengembangan perkebunan di Kalimantan Timur yang telah dilaksanakan adalah dengan Pola PIR, Pola Swadaya/Parsial dan Pola Perkebunan Besar baik BUMN (PTPN XIII) maupun swasta.

Sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang penting baik dalam pembangunan ekonomi, sosial maupun ekologi di Kalimantan Timur, peranan tersebut semakin penting karena merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam dan tidak tergantung pada komponen impor sehingga tidak terpengaruh dengan situasi ekonomi dunia yang sering tertimpa krisis sub sektor perkebunan juga merupakan sektor yang banyak menyerap tenaga kerja dimana upaya pemerintah dalam menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebesar 5,1 – 8,2

% cukup sulit untuk dicapai apabila tidak ada upaya nyata untuk mengembangkan sektor riil, salah satu upaya untuk mengatasi hal tersebut adalah melalui pengembangan pada sektor perkebunan.

Pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur diarahkan untuk meningkatkan kontribusi perkebunan dalam akselerasi pemulihan ekonomi seperti peningkatan pendapatan masyarakat, perluasan kesempatan kerja serta meningkatkan perannya dalam memperbaiki indikator ekonomi makro. Upaya yang telah dilakukan, memberikan berbagai manfaat dan kemajuan antara lain dalam sumbangannya terhadap pendapatan domestik bruto, pengembangan wilayah dan konservasi kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Sub sektor perkebunan mempunyai peranan yang sangat penting baik dalam pengembangan wilayah, ekonomi, sosial maupun ekologi. Peranan tersebut semakin penting karena perkebunan merupakan sub sektor yang berbasis sumber daya alam yang tidak tergantung pada komponen impor, sehingga mampu menghadapi situasi krisis ekonomi.

Diagram Anggaran Pembangunan Perkebunan Tahun 2012

Pada tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi anggaran secara keseluruhan sebesar Rp. 65.537.125.000,- yang berasal dari dana APBN sebesar Rp. 18.414.848.000,- terdiri dari Rp. 3.860.571.000,- untuk provinsi (DK), Rp. 9.211.102.000,-untuk provinsi (TP) dan Rp. 5.343.175.000,- untuk Kabupaten (TP), serta APBD sebesar Rp. 47.122.277.000,- termasuk didalamnya dana APBD Perubahan sebesar Rp. 1.015.500.000,-

Untuk Dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) meliputi kegiatan Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) Rp. 12.065.626.000,- Satuan Kerja Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perkebunan (PPHP) sebesar Rp. 1.626.700.000,- dan Satuan Kerja Direktorat Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) sebesar Rp. 4.722.522.000,-. Dari keseluruhan dana tersebut realisasi fisik yang dicapai adalah APBN sebesar 90,91 % dan APBD sebesar 97,60 %

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

Pembangunan perkebunan lebih berorientasi pada pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama melalui pengembangan komoditas perkebunan yang mencerminkan prinsip pemberdayaan masyarakat, sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mempunyai visi tentang arah pengembangan pembangunan perkebunan yang akan dicapai.

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur adalah :

" *Terwujudnya perkebunan berdaya saing, berkerakyatan dan berkelanjutan menuju masyarakat yang sejahtera* "

Visi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mengandung makna bahwa pengembangan sektor perkebunan memiliki kemampuan bersaing di pasar global dan bersifat pro rakyat, sektor perkebunan juga diharapkan mampu memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

B. DASAR HUKUM

1. Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang – undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 tahun 2002 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
4. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2003 tentang organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Timur;
5. DPA – SKPD Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

C. KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan pembangunan perkebunan Kalimantan Timur dalam jangka waktu 5 tahun dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai RENSTRA 2009 – 2013 adalah sebagai berikut :

1. Mengawal perencanaan dan pengelolaan pembangunman perkebunan yang berkelanjutan secara akurat dan komprehensif (Comprehensivenes planning)
2. Meningkatkan pengembangan dan perluasan perkebunan dengan pemberdayaan masyarakat (Development, Extensibility and Empowerment)
3. Memfasilitasi revitalisasi usaha perkebunan yang berdaya saing (Copetitiveness)
4. Memfasilitasi peningkatan produksi dan produktifitas perkebunan (Productivity)
5. Mengawal pembangunan perkebunan yang aman, produktif dan berkelanjutan (Sustainability)
6. Mengembangkan sistem pelayanan, pengawalan dan pengawasan peredaran benih perkebunan (System Approach)
7. Mengembangkan sistem pelayanan dan penerapan teknologi pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan (Technology implementation)
8. Mengembangkan sistem pelayanan, penerapan teknologi budidaya dan pengolahan hasil perkebunan (Processing Technology Development)

D. ARAH KEBIJAKAN

Kebijakan pembangunan dibidang produksi perkebunan diarahkan pada upaya untuk menggerakan dan mefasilitasi pengembangan produksi perkebunan yang berorientasi pasar melalui peningkatan daya kreasi, inovasi dan partisipasi masyarakat melalui :

1. Percepatan peningkatan produktivitas yang dioperasionalkan melalui perluasan dan sosialisasi penerapan intensifikasi, rehabilitasi, diversifikasi dan ektensifikasi dengan memperhatikan daya saing, perkembangan iptek dan lingkungan.
2. Pemberdayaan masyarakat perkebunan yang dioperasionalkan melalui upaya pengembangan SDM dan penguasaan Iptek dengan meningkatkan kegiatan pendidikan, pelatihan serta pendampingan.
3. Memfasilitasi penataan kelembagaan yang dioperasionalkan melalui upaya fasilitasi pengembangan jejaring kerja, pembentukan lembaga keuangan alternatif, pengembangan lembaga petani, lembaga pemasaran serta lembaga usaha lainnya.

BAB. II ORGANISASI DAN KETENAGAAN

A. STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur No. 08 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pasal 57 yang mencamtumkan Tugas Pokok Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur "***Melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Perkebunan Berdasarkan Atas Otonomi dan Tugas Pembantu".*** Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut Dinas Perkebunan mempunyai fungsi yang tertuang pada pasal 58 yaitu :

a. Perumusan kebijakan teknis bidang perkebunan sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan Pemerintah Daerah;
b. Perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang perkebunan;
c. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis pengembangan perkebunan;
d. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis produksi perkebunan;
e. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis usaha perkebunan;
f. Perumusan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis perlindungan perkebunan;
g. Penyelenggara urusan kesejretariatan
h. Pelaksanaan Unit Pelaksana Teknis Dinas
i. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional
j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan susunan organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tercantum pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 08 Tahun 2008 Tanggal 23 Juli 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur, terdiri atas :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris, membawahkan :
   - Sub Bagian Perencanaan Program;
   - Sub Bagian Umum;
   - Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang Pengembangan, membawahkan :
   - Seksi Penyiapan dan Pemanfaatan Lahan;
   - Seksi Pengembangan dan Perluasan Areal;
   - Seksi Penataan Kelembagaan dan SDM Petani.
4. Bidang Produksi, membawahkan :
   - Seksi Bahan Tanaman;
   - Seksi Budidaya Tanaman;
   - Seksi Teknologi Alat dan Mesin.
5. Bidang Usaha, membawahkan :
   - Seksi Administrasi Perijinan;
   - Seksi Pembinaan Usaha;
   - Seksi Standarisasi Mutu dan Pemasaran Produk.
6. Bidang Perlindungan, membawahkan :
   - Seksi Sarana Perlindungan Perkebunan;
   - Seksi Peramalan, Pengamatan dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
   - Seksi Konservasi Tanah dan Air.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2012

STRUKTUR DINAS PERKEBUNAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Lampiran III Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur
Nomor : 08 Tahun 2008
Tanggal : 23 Juli 2008
Tentang : Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Timur

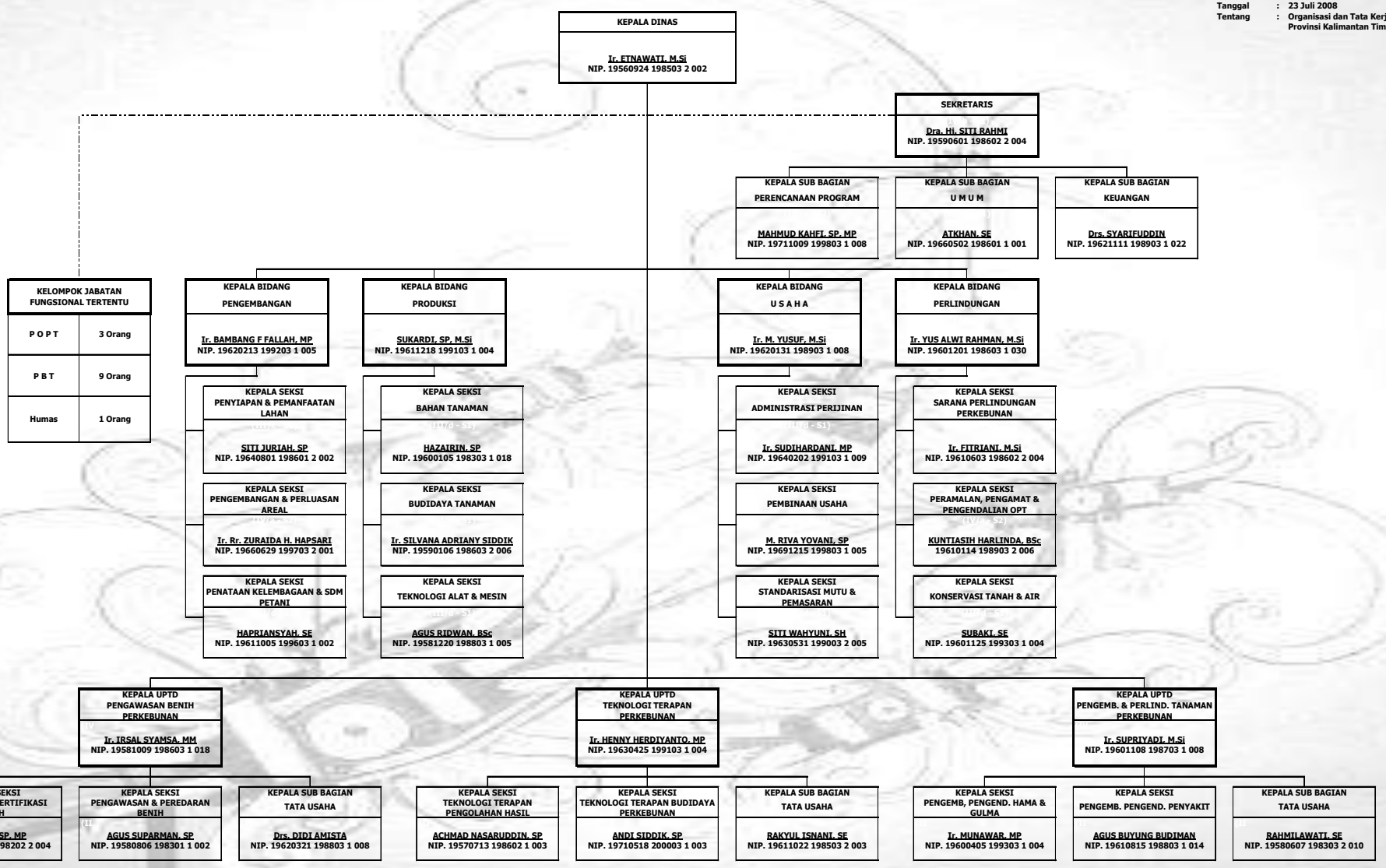

B. KEPEGAWAIAN

Jumlah pegawai berdasarkan status pegawai sampai dengan tahun anggaran 2012 di lingkup Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 118 (Seratus Delapan Belas) orang, dengan komposisi kepegawaian sesuai tabel berikut ini :

a) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan dan Gender

Jumlah pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan golongan dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 1. Jumlah pegawai berdasarkan Golongan dan Gender

Gender	Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	12	37	17	3	69
Wanita	5	31	13	0	49
	17	68	30	3	118

b) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Eselon dan Gender

Jumlah pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan eselon dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 2. Jumlah pegawai berdasarkan eselon dan gender

Gender	Eselon					Non Eselon	Jumlah
	I	II	III	IV	V		
Pria	0	0	7	15	0	47	69
Wanita	0	1	1	9	0	38	49
	0	1	8	24	0	85	118

c) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Gender

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan tingkat pendidikan dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 3. Jumlah pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan gender

Gender	Eselon											Jumlah
	S3	S2	S1	D.IV	SM	D.III	D.II	D.I	SLTA	SLTP	SD	
Pria	1	11	27	0	1	1	0	3	22	3	0	69
Wanita	0	4	26	0	1	1	0	0	17	0	0	49
	1	15	53	0	2	2	0	3	39	3	0	118

d) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Agama dan Gender

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan agama dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Jumlah pegawai berdasarkan agama dan gender

Gender	Agama							Jumlah
	Islam	Kristen Protestan	Katolik	Hindu	Budha	Konghucu	Lain-lain	
Pria	69	0	0	0	0	0	0	69
Wanita	46	3	0	0	0	0	0	49
	115	3	0	0	0	0	0	118

e) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Usia dan Gender

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan usia dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah pegawai berdasarkan usia dan gender

Gender	Usia									Jumlah
	> 55	51-55	46-50	41-45	36-40	31-35	26-30	21-25	< 20	
Pria	3	31	14	10	4	5	1	1	0	69
Wanita	2	16	12	8	7	4	0	0	0	49
	5	47	26	18	11	9	1	1	0	118

f) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan DIKLATPIM dan Gender

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan DIKLATPIM dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender

Gender	DIKLATPIM				Jumlah
	TK. I	TK. II	TK. III	TK. IV	
Pria	1	0	14	12	69
Wanita	0	1	7	5	49
	1	1	21	17	118

g) Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jabatam Fungsional Tertentu dan Gender

Pegawai Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Jabatan Fungsional Tertentu dan gender adalah sebagai berikut :

Tabel 6. Jumlah pegawai berdasarkan DIKLATPIM dan gender

Gender	JAPUNG Golongan				Jumlah
	IV	III	II	I	
Pria	2	5	3	0	10
Wanita	0	3	0	0	3
	2	8	3	0	13

h) Tenaga Kontrak Pendamping Perkebunan (TKP)

Jumlah Tenaga Kontrak Pendamping Perkebunan sampai tahun 2012 berjumlah 17 orang yang tersebar di 8 (Delapan) Kabupaten/kota dengan rincian :

- Kota Samarinda : 1 orang
- Kab. Kutai Kartanegara : 1 orang
- Kab. Kutai Timur : 5 orang
- Kab. Kutai Barat : 1 orang
- Kab. Paser : 3 orang
- Kab. Penajam Paser Utara : 2 orang
- Kab. Berau : 1 orang
- Kab. Bulungan : 1 orang
- Dinas Perkebunan Provinsi Kaltim : 2 orang

i) Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping (PLP-TKP)

Jumlah Pembantu Lapang Petugas Tenaga Kontrak Pendamping Perkebunan pada tahun 2007 s/d 2012 berjumlah 18 (Delapan Belas) orang yang tersebar di 6 (Enam) Kabupaten/kota dengan rincian :

- Kab. Nunukan : 3 orang
- Kab. Kutai Kartanegara : 1 orang
- Kab. Kutai Timur : 7 orang
- Kab. Kutai Barat : 1 orang
- Kab. Paser : 4 orang
- Kab. Penajam Paser Utara : 2 orang

BAB. III MEKANISME ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

A. AGENDA SURAT

Agenda surat adalah salah satu bagian dari kegiatan tata usaha yang merupakan pusat pelayanan administrasi dan ketata usahaan, fungsi utamanya meliputi pengurusan surat – menyurat, baik surat masuk maupun surat keluar. Berikut ini kami uraikan jumlah surat masuk/keluar pada kegiatan Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012.

Tabel 7. Jumlah surat masuk dan keluar pada Dinas Perkebunan Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012.

No.	Agenda Surat	Teknis	Non Teknis	Jumlah
1.	Surat Masuk	403	441	844
2.	Surat Keluar	110	940	1.050
	TOTAL	513	1.381	1.894

Dari uraian tersebut diatas total agenda surat 1.894 lembar, terdiri dari surat teknis 513 lembar, surat non teknis 1.381 lembar. Agenda surat masuk berjumlah 844 lembar, agenda surat keluar berjumlah 1.050 lembar.

Klarifikasi surat masuk dan keluar tersebut adalah berupa : Surat edaran, undangan, koordinasi, konsultasi, kerjasama, kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan yang dapat disinergiskan dengan Dinas, antara lain :

- Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten Se Kalimantan Timur.
- Dinas Pemerintah Provinsi / Kota / Kabupaten Se Kalimantan Timur.
- Departemen terkait / Balai – balai penelitian terkait
- Perguruan Tinggi Negeri / Swasta yang ada di Provinsi / Kota / Kabupaten
- Lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan Masyarakat petani
- Wirausaha / Swasta / BUMN / BUMD, dsb.

B. INVENTARISASI BARANG

APBD

Barang Inventaris Dinas Perkebunan dan 3 UPTD Dinas Perkebunan yang masih ada hingga saat ini yang masih terdaftar di biro Perlengkapan Sekretaris Provinsi Kalimantan Timur. Dengan adanya barang – barang inventaris tersebut diatas, sangat mendukung bagi kegiatan operasional Dinas Perkebunan dan 3 UPTD Dinas Perkebunan. Daftar Inventaris Barang secara jelas ada pada Lampiran 1.

Aset Tetap merupakan berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan , hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya. Jumlah aset tetap sebesar Rp. 30.566.753.507,- merupakan nilai aktiva tetap yang dimiliki dan atau dikuasai Pemerintah Prov. Kalimantan Timur per 31 Desember 2012, yang terdiri dari :

1. Tanah
2. Peralatan dan Mesin
3. Gedung dan Bangunan
4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan
5. Aset Tetap Lainnya

APBN

Aset Tetap yang dimiliki Satker DK dan TP (05) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2012 DK sebesar Rp. 27.930.892.303,- terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalanan, Irigasi dan Jaringan, serta Aset Tetap lainnya. Untuk Aset Tetap TP sebesar Rp. 432.473.000,- berupa Peralatan dan Mesin.

Aset Tetap yang dimiliki Satker DK (07) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 1.929.949.750,- yang terdiri dari peralatan dan mesin serta Gedung dan Bangunan. Sedangkan untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp. 0,-

Aset Tetap yang dimiliki Satker DK (08) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur per 31 Desember 2012 sebesar Rp. 75.475.000,- yang terdiri dari Peralatan dan Mesin. Sedangkan untuk Tugas Pembantuan sebesar Rp. 0,-. Daftar Inventaris Barang APBN seperti tercantum di dalam lampiran 2.

C. ASPEK KEUANGAN

Pada tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan alokasi dana pembangunan perkebunan sebesar Rp. 65.537.125.000,- yang meliputi kegiatan APBD dan APBN Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota dan terserap sebesar Rp. 55.964.186.595,- dengan rincian dana APBN sebesar Rp. 18.414.848.000,- terserap Rp 14.250.500.919,- dan dana APBD sebesar Rp. 47.122.277.000,- terserap Rp. 41.713.685.676,-

Selain Dana APBD Murni Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur juga mendapatkan alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) sebesar Rp. 1.015.500.000,- yang dialokasikan pada kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor sebesar Rp. 230.000.000,- , kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan sebesar Rp. 122.700.000,-, kegiatan Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Perkebunan Produk Pertanian Rp. 32.800.000,- Kegiatan Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat sebesar Rp. 110.000.000,- dan Kegiatan Pengadaan Rapat-rapat Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan ke Dalam Daerah UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan sebesar Rp. 20.000.000,-.

Tabel 8. Target dan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2012

SATUAN KERJA	PAGU ANGGARAN (RP)	CAPAIAN KEUANGAN		Fisik %	KET
		REALISASI (RP)	%		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) DK	1,526,349,000	1,015,665,050	66.54	74.94	
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (05) TP	7,451,102,000	4,858,622,380	65.21	78.00	
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN KAB. KUTAI TIMUR (05) TP	412,253,000	307,084,000	74.49	77.01	
SATUAN KERJA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KAB. NUNUKAN (05) TP	1,068,966,000	967,790,000	90.54	96.00	
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN KAB. BERAU (05) TP	1,606,956,000	1,345,234,014	83.71	90.00	
JUMLAH SATKER (05) DK + TP PROV + TP KAB	12,065,626,000	8,494,395,444	70.40	87.76	
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (07) DK	1,076,700,000	859,061,011	79.79	97.21	
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (07) TP	550,000,000	484,160,000	88.03	94.20	
JUMLAH SATKER (07) DK + TP PROV.	1,626,700,000	1,343,221,011	82.57	96.20	
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (08) DK	1,257,522,000	959,935,464	76.34	89.26	
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN PROV. KALTIM (08) TP	1,210,000,000	1,210,000,000	100.00	100.00	
SATUAN KERJA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KAB. PPU (08) TP	2,255,000,000	2,242,949,000	99.47	100.00	
JUMLAH SATKER 08 DK & TP	4,722,522,000	4,412,884,464	93.44	97.14	
JUMLAH TOTAL DANA DEKONSENTRASI (DK)	3,860,571,000	2,834,661,525	73.43	85.82	
JUMLAH TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) PROV.	9,211,102,000	6,552,782,380	71.14	89.91	
JUMLAH TOTAL DANA TUGAS PEMBANTUAN (TP) KAB.	5,343,175,000	4,863,057,014	91.01	96.30	
JUMLAH TOTAL DANA TP PROVINSI + TP KAB	14,554,277,000	11,415,839,394	78.44	92.26	
JUMLAH TOTAL DANA DK & TP	18,414,848,000	14,250,500,919	77.39	90.91	

Tabel 9. Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2012

No	Kegiatan	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	(%) Keu	(%) Fisik
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
I	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)				
	a Penyusunan Database potensi produksi pangan	1,682,240,000	1,470,165,800	87.39	100.00
	b Monitoring, evaluasi dan pelaporan	762,000,000	669,573,400	87.87	100.00
	c Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan	2,032,800,000	1,936,159,865	95.25	100.00
	d Pengembangan Perbenihan/Perbibitan	738,600,000	713,873,900	96.65	100.00
	T O T A L	5,215,640,000	4,789,772,965	91.83	100.00
II	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan				
	a Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan	893,000,000	801,615,925	89.77	95.00
	b Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah Perkebunan	350,000,000	238,256,300	68.07	100.00
	c Pengolahan informasi permintaan pasar hasil produksi pertanian perkebunan masyarakat	600,000,000	519,394,200	86.57	100.00
	T O T A L	1,843,000,000	1,559,266,425	84.60	97.58
III	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan				
	a Identifikasi blok penghasil tinggi (BPT), Pengawasan, Waralaba, Peny. RKDK Pupuk dan Inventarisasi Plasmanutfah	1,736,500,000	1,467,372,025	84.50	93.63
	b Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat	15,205,550,000	13,301,409,875	87.48	98.00
	T O T A L	16,942,050,000	14,768,781,900	87.17	97.55
IV	Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan				
	a Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	266,750,000	221,164,800	82.91	95.00
	b Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Petani Perkebunan	499,723,050	343,660,200	68.77	95.00
	T O T A L	766,473,050	564,825,000	73.69	95.00
V	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan				
	a Uji Bahan Pengendali Penyakit, Hama & Patogen pada Tanaman Perkebunan	1,435,580,000	1,348,995,650	93.97	98.00
	b Pengadaan Sarana & Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	996,650,000	925,529,000	92.86	96.50
	T O T A L	2,432,230,000	2,274,524,650	93.52	97.39
VI	Rutin SKPD				
	a Belanja Tidak Langsung	*11,106,777,000*	*10,419,566,122*	*93.81*	*100.00*
	b Belanja Langsung	*8,816,106,950*	*7,336,948,614*	*83.22*	*95.27*
	T O T A L	19,922,883,950	17,756,514,736	89.13	97.91
	GRAND TOTAL	**47,122,277,000**	**41,713,685,676**	**88.52**	**97.60**

Kegiatan yang tidak dilaksanakan

Secara keseluruhan pelaksanaan pembangunan perkebunan baik yang berasal dari dana APBD maupun APBN telah terserap dan mencapai sasaran yang telah diprogramkan, namun masih saja ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dengan berbagai alasan, diantaranya adalah :

Tabel 10. Daftar Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

No.	Uraian Kegiatan	Jumlah Anggaran (Rp.)	Permasalahan/ Kendala
1.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan (Bidang Pengembangan) - Pengadaan Bibit Kelapa Sawit, Karet, Kakao dan Kelapa Dalam - Sertifikasi Lahan GERNAS KAKAO (300 Ha)	8.775.000.000 600.000	Pemenang Rp. 6.699.250.000 Realisasi Rp. 4.903.000.000, Kontraktor wan prestasi, pengadaan bibit karet tidak terealisir sehingga dana tidak terserap seluruhnya BPN Berau tidak menerbitkan RAB dalam kerjasama tersebut sehingga KPA tidak berani membayar
2.	Program Pengadaan Sofware Pengolah Peta / Citra (Aplikasi) (Sekretariat)	90.000.000	Sofware telah diadakan pada tahun 2010 belum dipoeraionalkan secara optimal, sedangkan pengadaan 2012 merupakan advance dari program yang diadakan tahun 2010, sehingga untuk sementara masih belum diperlukan
3.	Belanja Bahan Material Bahan Peta (Sekretariat)	250.000.000	Terrealisasi Rp. 61.250.000,- disebabkan karena pengadaan Citra sudah mencukupi standar minimal dari kebutuhan untuk proses pemetaan dan telah disesuaikan dengan situasi – situasi kondisi data spasial PBS yang teridentifikasi tidak memanfaatkan lahan secara maksimal
4.	Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Bidang Perlintan) Pertemuan Ikatan Pemandu Lapang Perkebunan Tingkat Nasional di Kalimantan Timur	73.500.000	Kegiatan dialihkan ke Prov. Jawa Barat
5.	Program Peningkatan Displin Aparatur (UPTD PBP) - Pengadaan Pakaian Dinas - Pengadaan Pakaian Korpri	 10.400.000 4.550.000	Pelaksanaan dialihkan ke Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (Menggunakan Anggaran Dinas Perkebunan Prov. Kaltim)
6.	Program Peningkatan Displin Aparatur (UPTD P2TP) - Pengadaan Pakaian Korpri - Pengadaan Pakaian Batik - Pengadaan Pakaian Olah Raga, Topi dan Sepatu	 5.400.000 5.400.000 12.600.000	 Pelaksanaan dialihkan ke Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (Menggunakan Anggaran Dinas Perkebunan Prov. Kaltim)
7	Program Peningkatan Displin Aparatur (UPTD T2P)		

	- Pengadaan Pakaian Korpri	4.550.000	Pelaksanaan dialihkan ke Dinas Perkebunan Prov. Kaltim (Menggunakan Anggaran Dinas Perkebunan Prov. Kaltim)

D. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Selama tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam peningkatan kwalitas Sumber Daya Manusia banyak mengikuti dalam seminar/pelatihan/pertemuan teknis baik lokal maupun luar daerah. Daftar Seminar dan Bimtek yang pernah diikuti tercantum pada Lampiran 3.

BAB. IV PELAKSANAAN KEGIATAN

A. URAIAN PELAKSANAAN KEGIATAN SUMBER DANA APBD

Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam menjalankan tugas kedinasan dibantu oleh 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Sekretaris serta 3 (tiga) Kepala UPTD sebagai Pelaksana tugas pokok dalam pembangunan perkebunan.

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan, koordinasi perencanaan program dan pelaporan serta meliputi urusan umum dan kehumasan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan dan administrasi keuangan.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian :

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Umum berdasarakan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan untuk optimalisasi tugas.
- Melakukan pembinaan dan penilaian pegawai sesuai peraturan dengan cara memberikan pengarahan sesuai peraturan dan pedoman yang ada dalam rangka untuk meningkatkan kinerja pegawai.
- Mendistribusikan tugas kepada pegawai sesuai dengan jabatannya agar semua pekerjaan dapat diselesaikan dengan baik.
- Menyusun dan membuat laporan hasil monitoring realisasi kegiatan inventaris barang / aset secara periodik berdasarkan peraturan perundang – undangan.
- Mengevaluasi pelaksanaan tugas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalah.
- Mengikutsertakan staf dalam pendidikan formal dan non formal (Anjab, Bimtek, Diklat PIM, Kursus, dll)
- Perekrutan dan pelatihan petugas pendamping revitalisasi perkebunan
- Penataan Organisasi.
- Surat-menyurat, pemeliharaan dan peninjauan operasional kendaraan dinas;
- Penyediaan alat tulis kantor, jasa kebersihan kantor serta operasional lisrik, air dan telepon;
- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan serta penyediaan barang cetakan.

b. Sub Bagian Keuangan :

- Mengawasi dan mengendalikan kegiatan pembukuan dan administrasi keuangan dalam rangka tertib administrasi keuangan.
- Meneliti dan menyempurnakan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai realisasi dan bukti-bukti pengeluaran agar tertib administrasi.
- Mengawasi dan mengarahkan pelaksanaan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran anggaran berdasarkan peraturan yang berlaku agar tertib administrasi.
- Menyiapkan bahan laporan hasil monitoring realisasi kegiatan penyusunan anggaran perbendaharaan, verifikasi dan akuntansi keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk optimalisasi tugas.

c. Sub Bagian Perencanaan Program

- Menyiapkan bahan penyusunan rencana program Sub Bagian Perencanaan Program berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai bahan acuan.
- Menyiapkan bahan penyusunan RKA, DPA, DIPA , Rencana Kerja, Pedoman Umum, IKU, PK, LAKIP sesuai peraturan yang berlaku sebagai acuan kegiatan.
- Mengevaluasi dan menyiapkan bahan laporan realisasi anggaran secara periodik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta upaya penyelesaian masalah.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Perencanaan Program, meliputi :

❖ Kegiatan Penyusunan Data Base Potensi Produksi Pangan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 1,682,240,000,- realisasi keuangan Rp. 1,470,165,800,- atau 87.39 % dengan realisasi fisik 100 %, sub kegiatan sebagai berikut :

- Rapat Koordinasi Pembangunan Perkebunan (RAKORBUN) 2012

  Pelaksanaan Rakorbun dilaksanakan di Ruang Pendopo Lamin Etam Kantor Gubernur pada tanggal 19 Maret 2012 dan di Hotel International Swiss Bell pada tanggal 20 Maret 2012 yang diikuti oleh Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur yang dibuka secara resmi oleh Gubernur Kalimantan Timur. Adapun kegiatan orientasi lapangan ke Provinsi Jambi, dengan fokus kunjungan adalah kebun revitalisasi non kemitraan karet dan kemitraan.

  Adapun Kesepakatan Rakorbun 2012 adalah :

  - Bupati/Walikota mentaati segala ketentuan yang berlaku terkait pemberian ijin perkebunan (Ijin Lokasi, Ijin Usaha Perkebunan) dalam rangka mensukseskan pembangunan perkebunan. Terhadap Ijin usaha perkebunan yang telah mencapai 2,6 juta ha agar diinvetarisasi masalah-maslah yang dihadapi sehingga dicarikan solusinya sehingga target pencapaian satu juta ha kelapa sawit pada tahun 2013 dapat tercapai.

- Kedepan subsektor perkebunan diharapkan menjadi andalan perekonomian Kalimantan Timur karena selama ini telah terbukti dapat menjadi andalan perekonomian wilayah tertentu dan menyerap banyak tenaga kerja sehingga berpotensi menjadi solusi bagi penurunan angka kemiskinan.
- Master plan percepatan pembangunan ekonomi indonesia (MP3EI) telah menetapkan Kalimantan Timur sebagai koridor pembangunan ekonomi dan energi terbarukan, ditindaklanjuti dengan pengembangan kawasan Agroindustri Maloy, untuk itu kegiatan perkebunan yang merupakan industri hulu harus berbenah dan harus sukses.
- 26 Tahun 2007 masih akan dilakukan revisi oleh Kementerian Pertanian dan pada akhir bulan ini (Maret) akan dilakukan Publik Hearing (tanggapan masyarakat), pihak-pihak terkait di Kalimantan Timur diharapkan memberikan masukan agar dalam pelaksanaannya nanti tidak terjadi interprestasi yang berbeda-beda.
- Sistem penilaian kebun untuk konversi kebun non revitalisasi mekanismenya harus ada pedoman dari pemerintah pusat yang dalam hal ini Pemerintah pusat meminta masukan tentang item-item yang akan dimasukan dalam pedoman tersebut secara transparan seperti: bagaimana perjanjian kerjasamanya, status lahan, plafon kredit yang diberikan, bentuk pemberian kredit sampai dengan tanaman atau pertahun, sumber kredit dll.
- Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) telah teridentifikasi berdasarkan pengamatan dilapangan laporan masyarakat, PBS, PBN serta laporan dari Dinas yang Membidangi Perkebunan Kabupaten/Kota sebanyak 75 kasus, yang antara lain masalah tumpang tindih lahan, konflik antara Perusahaan dan masyarakat sekitar, status kepemilkan lahan (Okupasi) untuk itu agar meningkatkan komunikasi dengan berbagai pihak sehingga pembangunan perkebunan dapat berjalan sesuai dengan harapan masyarakat.
- Anomali iklim dapat menyebabkan adanya pengaruh yang serius terhadap budidaya tanaman perkebunan seperti adanya gangguan yang disebabkan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) yang tadinya tidak penting menjadi penting serta adanya kekeringan yang berkepanjangan ataupun adanya curah hujan yang tinggi maka dilakukan langkah-langkah antisipasi oleh berbagi pihak sehingga hal ini bisa dieliminir. Sedangkan untuk menjaga kelestarian lingkungan diharapkan kepada seluruh masyarakat pelaku usaha di bidang perkebunan agar dalam melakukan pembukaan lahan tidak dibenarkan dengan cara membakar (PLTB).
- Penyelesaian masalah aset Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu telah ditetapkan 3 ketentuan dari Menteri Keuangan selaku pengelola Barang Milik negara (BMN)
- Barang yang masih kondisi baik yang ada di Provinsi/Kabupaten dananya bersumber dari Pusat dan tidak dipergunakan Pusat maka dari Provinsi/kabupaten untuk dapat dihibahkan ke Kabupaten atau sesuai dengan keberadaan aset.
- Dari semua aset yang ada sampai proyek ditutup, aset yang belum sempat diserahkan ke daerah maka setiap semester harus dilaporkan ke Kementerian.

- Guna memperlancar pelaksanaan pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur baik yang didanai melalui APBD maupun APBN (dekonsentrasi dan Tuga Perbantuan) agar tetap berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

- Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan 2012

  Salah satu tujuan diadakannya Sinkronisasi Data Statistik Perkebunan 2012 adalah penyeragaman dan sinkronisasi data statistik antara Dinas Perkebunan Kabupaten/ Kota dan Provinsi, serta adanya kontinuitas pelaporan data statistik perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 1-3 Mei 2012 di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan

- Data dan Statistik meliputi :
  - Monitoring, Pengumpulan, Pengolahan dan Analisa
  - Penyajian / Penyusunan Data Statistik perkebunan
  - Pengelolaan Website dan LAN Perkebunan
  - Penyusunan Harga Standar Intern Perkebunan

- Penyusunan Rencana Kerja/Program/Kegiatan meliputi :
  - Penyusunan Anggaran
  - Penyusunan Rencana Kerja

- Pelatihan Komputer Berbasis Web

  Tujuan diadakannya Pelatihan Komputer Berbasis Web 2012 adalah melakukan koneksi ke internet, mengakses informasi di internet, menyajikan informasi perkebunan berbasis web serta menerima dan mengirim surat elektronik melalui email. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 3-5 Mei 2012 di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan

- Pencacahan Statistik Perkebunan Kerjasama Badan Pusat Statistik

  Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memperoleh angka produktivitas beberapa komoditi perkebunan rakyat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur. Adapun hasil pencacahan sebagaimana terdapat di dalam lampiran 2.

- Kegiatan e-Government Perkebunan Award 2012

  Sasaran dari kegiatan ini adalah memotivasi agar setiap unit lingkup Dinas Perkebunan Provinsi dan Dinas Perkebunan Kabupaten/Kota dapat mengembangkan informasi perkebunan di Kalimantan Timur yang berbasis e-government. E-Government sendiri mempunyai pengertian penyelenggaraan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien. Kegiatan e-Government Perkebunan Award 2012 ini dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2012 bertepatan dengan hari perkebunan.

❖ Kegiatan Monitoring, evaluasi dan pelaporan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 762,000,000,- realisasi keuangan Rp. 669,573,400,- atau 87,87 % dengan realisasi fisik 100 %, sub kegiatan sebagai berikut :

- Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Perkebunan, meliputi :
  - Penyusunan Laporan Evaluasi
  - Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  - Penyusunan MONEV
  - Penyusunan Laporan Tahunan
  - Penyusunan form TEPPA
- Workshop Simonev Perkebunan 2012

  Tujuan dari Workshop Simonev Perkebunan 2012 adalah membantu pelaksana kegiatan dalam melaporkan pelaksanaan kegiatannya sesuai tanggung jawab masing-masing secara online, mempermudah pemantauan/monitoring pelaksanaan kegiatan melalui pelaporan kegiatan secara rutin, mempercepat penyajian data serta mempertinggi tingkat akurasi data/informasi yang disajikan. Kegiatan ini dilaksanakan 1-3 Mei 2012 di Hotel Grand Tiga Mustika Balikpapan
- Rapat Koordinasi dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan Perkebunan

  Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah untuk mengetahui perkembangan kemajuan yang telah dicapai baik pada tingkat Provinsi maupun di kabupaten, mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan apakah sudah sesuai dengan sasaran dan rencana yang telah ditetapkan, mengevaluasi tingkat serapan/prosentase pelaksanaan kegiatan berdasarkan ROK yang telah dibuat serta melakukan inventarisasi masalah-masalah yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan dan solusi tindak lanjutnya. Kegiatan ini dilaksanakan 1 – 3 November 2012 bertempat di Hotel Mega Lestari Balikpapan

2. Bidang Bina Pengembangan

Bidang Bina Pengembangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan petunjuk identifikasi, petunjuk dan pembinaan operasional dalam rangka diversifikasi, intensifikasi / peremajaan dan perluasan tanaman perkebunan. Adapun kegiatan yang dilaksanakan Bidang Pengembangan pada tahun 2012 adalah sebagai berikut :

a. Kegiatan Pengembangan dan Operasional PIR Swadaya dan Kemitraan Perkebunan serta Pengembangan Kelapa Sawit Rakyat dengan pagu anggaran sebesar Rp. 15,205,550,000,- realisasi keuangan Rp. 13,301,409,875,- atau 87.48 % dengan realisasi fisik 98 %, sub kegiatan sebagai berikut :

- Pertemuan Teknis PIR Swadaya

  Tujuan dari diadakannya pertemuan ini adalah agar terlaksananya evaluasi kegiatan PIR Swadaya di lapangan dan program penanaman tahun 2011. Peserta yang mengikuti pertemuan ini berjumlah 60 orang. Pertemuan ini dilaksanakan di Kantor UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 17 April 2012

- Pertemuan Teknis Perluasan Areal

  Tujuan dari pertemuan ini adalah terciptanya koordinasi antara pembina dan petugas lapangan. Peserta yang mengikuti pertemuan ini berjumlah 60 orang, dilaksanakan di Kantor UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18 April 2012

- Pertemuan Penyusunan Program Penyuluhan

  Tujuan dari pertemuan ini adalah terciptanya koordinasi antara pembina dan petugas lapangan. Peserta yang mengikuti pertemuan ini berjumlah 60 orang, dilaksanakan di Kantor UPTD Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 18-19 April 2012

- Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 830 Ha

  Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya luas areal kelapa sawit rakyat dan selanjutnya akan meningkatkan lapangan kerja di pedesaan.

  Tabel 11. Pengembangan Tanaman Kelapa Sawit 830 Ha

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Paket Yang Diterima
1.	Kutai Kartanegara	Samboja	1. Karya Bahagia	71	- Bibit Kelapa Sawit 140 Batang - Pupuk NPK 120 Kg/Ha - Herbisida 5 Liter/Ha - Kawat 800 Ha mendapat 128 Potong - Honorarium Land Clearing Rp. 296.000/Ha
			2. Mekar Abadi	24	
			3. Tani Makmur	32	
			4. Usri	75	
			5. Karya Baru	56	
			6. Sawit Sejahtera	51	
			7. Karya Merdeka	24	
			8. Bina Usaha	32	

Lanjutan tabel 11

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Paket Yang Diterima
		Muara Badak	1. Alam Indah	50	
			2. Gema Persatuan	75	
			3. Mandar Baru	60	
		Marang Kayu	1. Etam Sederhana	100	
2	Samarinda		1. Karya Sederhana	100	
			2. Pemunga Tawai	40	
			3. Yulu Atia	40	

- Pengembangan Tanaman Karet 497 Ha

Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya luas areal karet rakyat dan selanjutnya akan meningkatkan lapangan kerja di pedesaan.

Tabel 12. Pengembangan Tanaman Karet 497 Ha

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Paket Yang Diterima
1.	Kutai Kartanegara	Samboja	1. Setia Kawan	14	- Bibit Karet 500 batang/ha
			2. Setia Dharma Suka Maju	14	
			3. Suka Maju	14	
			4. Sepakat	14	
			5. Setia Bulu Beta	14	
			6. Tunas Harapan	14	
		Loa Janan	1. Rahmatullah	25	
			2. Bone Indah	19,5	
			3. Makmur II	30,5	
		Muara Badak	1. Maju Bersama	60	

Lanjutan tabel 12

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Paket Yang Diterima
		Marang Kayu	1. Bina Usaha Tani	50	
			2. Tani Makmur	30	
			3. Tani Maju	30	
		Kota Bangun	1. Karya Bersama	16	
			2. Rimba Ayu Lestari	21	
2.	Kutai Barat	Bongan	1. Karya Makmur	25	
		Barong Tongkok	1. Bua Rayeq	33	
		Tering	1. Bhineka I	32	
3.	Penajam Paser Utara	Sepaku	1. Lestari Taka Jaya	41	

- Pengembangan Tanaman Karet 100 Ha

Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya luas areal karet rakyat dan selanjutnya akan meningkatkan lapangan kerja di pedesaan.

Tabel 13. Pengembangan Tanaman Karet 100 Ha

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Paket Yang Diterima
1.	Kutai Kartanegara	Samboja	1. Dahlia	15	- Bibit karet 500 Batang/Ha - Pupuk NPK 100 Kg/Ha - Herbisida 5 Liter/Ha - Honorarium Land Clearing Rp. 276.600/Ha
			2. Sumber Makmur	15	
			3. Karya Bersama	15	
		Muara Badak	1. Taruna Abadi	20	
		Kota Bangun	1. Makmur	15	
			2. Karya Utama	20	

- Pengembangan Tanaman Karet 170 Ha

Outcome yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya luas areal karet rakyat dan selanjutnya akan meningkatkan lapangan kerja di pedesaan.

Tabel 14. Pengembangan Tanaman Karet 170 Ha

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Paket Yang Diterima
1.	Kutai Kartanegara	Marang Kayu	1. Rukun Iku Gawe Santoso	35	- Bibit karet 500 Batang/Ha - Pupuk NPK 100 Kg/Ha - Herbisida 5 Liter/Ha - Honorarium Land Clearing Rp. 276.600/Ha
			2. Sidomulyo	30	
			3. Sumber Rejeki	30	
		Muara Jawa	1. Karya Makmur	45	
2.	Samarinda		1. Cahaya Mutiara	30	

- Pengadaan Bibit Tanaman Kelapa Sawit dan Karet (Bantuan Bibit Perkebunan di Kabupaten Kutai Timur)

Tabel 15. Pengembangan Tanaman Karet 170 Ha

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Paket Yang Diterima
1.	Kutai Timur	Kaliorang	1. Bukit Karya	40	- Bibit Kelapa Sawit 40 Ha menerima 120 Batang - Bibit karet 20 Ha menerima 273 Batang - Bibit karet 10 ha menerima 274 batang
			2. Karya Bersama	20	
				10	

- Pengadaan Pupuk dan Herbisida Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit 750 Ha

Tabel 16. Pengadaan Pupuk dan Herbisida Pemeliharaan Tanaman Kelapa Sawit 750 Ha

No	Kab / Kota	Kecamatan	Kelompok Tani	Luas (Ha)	Paket Yang Diterima
1.	Samarinda	Samarinda Utara	1. Karya Bersama	25	- Pupuk NPK 100 Kg/Ha - Herbisida 5 Liter/Ha
			2. Yulu Atia	25	
2.	Kutai Kartanegara	Muara Jawa	1. Karya Bersaudara	25	
			2. Tunas Harapan	35	
		Muara Badak	1. Mandar Baru	8	
			2. Buana	50	
			3. Mandar Karya	31	
			4. Tunas Jaya	36	
		Samboja	1. Rukun Abadi	25	
			2. Bina Bersama	70	
			3. Bina	25	
			4. Karya Baru	25	
			5. Sejahtera	2	
			6. Maju Bersama	46	
			7. Karya Bersama	27	
			8. Subur Makmur	58	
			9. Karya Merdeka	104	
		Loa Janan	1. Sadar II	49	
			2. Seia Sekata	35	

- Pendampingan Kelompok Tani Kelapa Sawit dan Karet

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya peranan kelembagaan petani dalam menunjang usaha tani sawit dan karet, meningkatnya pemahaman petani tentang teknis budidaya kelapa sawit dan karet, meingkatnya pemahaman petani tentang sistem kerjasama ekonomi dalam usaha kelompok, serta meningkatnya fungsi dan peranan kelompok tani di dalam mengelola kelembagaan poktan yang lebih produktif serta pengelolaan sistem keuangan.

Tabel 17. Pendampingan Kelompok Tani Kelapa Sawit dan Karet

No	Kabupaten	Kecamatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Kutai Kartanegara	Samboja	25-27 Sept 2012	- Kantor UPP Kec. Samboja	240 orang
				- Balai pertemuan kantor kel. Karya merdeka	
				- Balai pertemuan kel. Amborawang laut kec. Samboja	
		Muara Badak	11-13 Sept 2012	- Balai pertemuan kecamatan	90 orang
		Samarinda Utara	11-13 Sept 2012	- Balai pertemuan kantor kel. Sei Siring	90 orang
		Marang Kayu	11-13 Sept 2012	- Balai pertemuan Desa Makarti	60 orang
		Muara Jawa	25-27 Sept 2012	- Balai pertemuan Desa Muara Kembang	60 orang
		Loa Janan	25-27 Sept 2012	- Balai pertemuan kantor UPT Disbun Cab.Loa Janan	90 orang
		Loa Kulu	3-5 Okt 2012	- Balai pertemuan Desa Jonggon	60 orang
2.	Penajam Paser Utara		4-6 Okt 2012	- Balai pertemuan kelurahan Semoi	180 orang

- Pelatihan Kelompok Tani Kelapa Sawit

Outcome dari kegiatan ini adalah meningkatnya SDM petani, meningkatnya pemahaman petani tentang kebersamaan ekonomi dalam berkelompok dan teknis budidaya serta meningkatnya fungsi dan peranan kelompok tani di dalam mengelola keuangan

Tabel 18. Pelatihan Kelompok Tani Kelapa Sawit

No	Kabupaten	Kecamatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Kutai Kartanegara	Samboja	1-3 Nov 2012	- Kantor UPP Kec. Samboja	210 orang
				- Balai pertemuan desa senipah	
				- Balai pertemuan kel. karya merdeka	
		Loa Janan	1-3 Nov 2012	- Balai UPP Loa Janan	30 orang
		Muara Badak	12-14 Nov 2012	- Balai pertemuan UPT Disbun	90 orang
		Kota Bangun	8-10 Nov 2012	- Balai pertemuan desa kota bangun III	60 orang
		Marangkayu	12-14 Nov 2012	- Balai Desa Santan Ulu	30 orang
2.	Samarinda	Samarinda Utara	12-14 Nov 2012	- Balai kelurahan Sei Siring	47 orang

- Pelatihan Kelompok Tani Karet

Tabel 19. Pelatihan Kelompok Tani Karet

No	Kabupaten	Kecamatan	Waktu Pelaksanaan	Tempat Pelaksanaan	Jumlah Peserta
1.	Kutai Kartanegara	Marangkayu	12-14 Nov 2012	- Balai Desa Prangat Baru	60 orang
2.	Penajam Paser Utara	Maridan	19-21 Nov 2012	- Balai Desa Maridan	30 Orang
3.	Kutai Barat	Bongan	22-24 Nov 2012	- Rumah Kepala Desa Kecamatan Bongan	60 orang

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Penumbuhan Kelembagaan Perkebunan dengan pagu anggaran sebesar Rp. 499,723,050,- realisasi keuangan Rp. 343,660,200,- atau 68.77 % dengan realisasi fisik 95 %, sub kegiatan sebagai berikut :

- Pembinaan kelembagaan perkebunan

  Tujuan dari kegiatan ini adalah berjalannya kelembagaan asosiasi petani komoditi perkebunan yang ada di wilayah Kalimantan Timur. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tanggal 13 Desember 2012 dengan jumlah peserta 60 (enam puluh) orang.

- Pengembangan Dinamika Kelompok Bagi Petugas Pendamping

  Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan petugas pendamping dalam hal menumbuhkan dinamika kelompok pada kelompok tani perkebunan. Kegiatan ini dilaksanakan di Hotel Diamond Samarinda pada tanggal 18 Oktober 2012.

- Penyusunan Program Penyuluhan

  Tujuan dari kegiatan ini adalah tersusunnya program penyuluhan yang sistematik dan efektif. Kegiatan ini dilaksanakan di ruang pertemuan UPTD Pengembangan Perlindungan Tanaman Perkebunan pada tanggal 19 April 2012.

3. Bidang Bina Produksi

Bidang Bina Produksi mempunyai tugas pokok dan fungsi antara lain melakukan (a) Pemantauan dan evaluasi penggunaan dan ketersediaan pupuk; (b) Pengawasan, pengadaan, peredaran, penggunaan dan standar mutu pupuk di wilayah Provinsi; (c) Indentifikasi dan Inventaisasi alat dan mesin serta penentuan kebutuan protipe alat dan mesin perkebunan; (d) Pembinaan dan pengawasan standar mutu alat dan mesin perkebunan wilayah Provinsi; (e) Pemantauan dan evaluasi penerapan pedoman perbenihan dan tehnis budidaya perkebunan; (f) Penyusunan kebijakan dalam pengaturan penggunaan benih perkebunan; (g) Identifikasi dan pengembangan varietas unggul lokal dan pemantauan benih import wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada Tahun 2012 Bidang Produksi memperoleh alokasi dana APBD sebesar Rp. 2.060.324.800,- yang terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 1.810.324.800,- dan APBD Perubahan sebesar Rp. 250.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 1.359.818.355,- atau 66,89 % dan realisasi fisik sebesar 76,22 % dengan kegiatan pokok adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan RDK/RDKK dan Pengawasan Pupuk
2. Pengawasan waralaba dan pembinaan PMUK
3. Dukungan Pelaksanaan Gernas Kakao
4. Revitalisasi Lada
5. Inventarisasi Plasma Nuftah dan Pembinaan Blok Penghasil Tinggi
6. Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Alat / Mesin Perkebunan:

1. Penyusunan RDK / RDKK dan Pengawasan Pupuk

Tujuan dari kegiatan ini adalah merencanakan kebutuhan riil pupuk bersubsidi untuk usaha tani tanaman pangan, perkebunan rakyat, hortikultura, tanaman hijauan makanan ternak sesuai azas 6 (enam) tepat yaitu tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, tepat waktu tepat tempat dan tepat harga.

Pembiayaan untuk kegiatan penyusunan RDK/RDKK dan pengawasan pupuk sebesar Rp. 457.407.400,- yang terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 407.407.400,- dan APBD Perubahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 91,64 % dan realisasi fisik sebesar 96,21 % (untuk APBD Murni) , sedangkan realisasi untuk APBD Perubahan realisasi fisik mencapai 91,50 % dan keuangan mencapai 91,50 %.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pelatihan Penyusunan RDK RDKK

Pelatihan ini bertujuan agar kelompok tani dapat menyusun rencana pengadaan / penyaluran pupuk, khususnya pupuk bersubsidi untuk kegiatan usahataninya sesuai dengan kebutuhan rill di lapangan. Pelatihan ini dilaksankan di 4 Kabupaten (Kab. Kutai Timur, Kutai Kertanegara,Kutai Barat dan Balikpapan) dengan peserta berjumlah 120 orang

b. Pengadaan Pupuk Promi

Pengadaan promi ini dilaksankan melalui pemilihan langsung oleh pihak ketiga, paket promi seluruhnya berjumlah 4.800 Kg yang diberikan / disalurkan kepada 112 kelompok tani, di Kabupaten Kutai Kertanegara (Kec. Loa Janan sebanyak 1.659 Kg untuk 28 Kelompok tani dan Kecamatan Samboja sebanyak 471 Kg yang diperuntukkan bagi 9 kelompok tani) dan Kabupaten Penajam Paser Utara (Kecamatan Sepaku sebanyak 2.670 Kg yang diperuntukkan bagi 75 kelompok tani)

c. Monitoring dan Pengawasan Penyalurann Pupuk Bersubsidi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 22/Permentan /SR.130/4/2012 tentang Perubahan Permentan No. 06/Permentan/SR.130/2/2012 tanggal 26 Desember 2010 tentang kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk bersubsidi yang selanjutnya dijabatkan melalui Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 21 Tahun 2012 tentang Penetapan Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2012 Kalimantan Timur memperoleh alokasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagai berikut : (1) Urea sebanyak 21.000 ton (sub sektor perkebunan sebanyak 4.633 ton); (2) SP-36 sebanyak 5.294 ton (sub sektor perkebunan sebanyak 1.594 ton); (3) ZA sebanyak 2.000 ton (sub sektor perkebunan sebanyak 797 ton); (4) NPK sebanyak 26.000 ton (sub sektor perkebunan 7.229 ton); dan pupuk organik sebanyak 2.500 ton (sub sektor perkebunan sebanyak 460 ton). Realisasi penyaluran pupuk Urea sebesar 20.000 ton, TSP 4.131 ton; ZA sebesar 1.508 ton dan NPK sebesar 18.725 ton.

2. Pengawasan Waralaba dan Pembinaan PMUK

Tujuan dari kegiatan ini adalah menumbuhkembangkan usaha kecil/menengah di bidang penydiaan benih perkebunan dengan jaminan mutu serta menyediakan benih unggul secara "5-tepat" yaitu tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu, tepat lokasi dengan pola kemitraan waralaba.
Pembiayaan untuk kegiatan Pengawasan Waralaba dan Pembinaan PMUK sebesar Rp. 300.457.400,- yang terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 200.457.400,- dan APBD Perubahan sebesar Rp. 100.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 68,29 % dan realisasi fisik sebesar 76,07 % (untuk APBD Murni) , sedangkan realisasi untuk APBD Perubahan realisasi fisik mencapai 76,49 % dan keuangan mencapai 76,49 %.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah :

a. Pengadaan Bahan Tanaman

Bahan tanaman yang diadakan berupa bibit karet sebanyak 1.000 batang, kakao 638 batang dan kelapa sawit sebanyak 1.000 batang. Pengadaan bahan tanaman ini dilakukan untuk mendukung pembuatan display kebun percontohan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur pada pelaksanaan PENAS XVII di Desa Perjiwa Kabupaten Kutai Kertanegara

b. Pembuatan Bahan Informasi Berupa Booklet dan Leaflet

Penyusunan dan percetakan booklet dengan judul "Penguatan Modal Usaha Kelompok sebanyak 600 buku"; "Standar Operasional Prosedur Penerbitan SP2B-KS sebanyak 600 buku" ;"Prosedur Operasional Baku Waralaba Kelapa Sawit sebanyak 100 buku"; "Profil Komoditi Unggulan Perkebunan sebanyak 100 buku"; "Petunjuk Pengendalian Hayati Penggerek Buah Kakao sebanyak 100 buku" ; leaflet dengan judul "Penggunaan Benih Unggul Kelapa Sawit sebanyak 1.500 lembar"

c. Pemantauan Penerbitan SP2B-KS dan rekomendasi benih Import

Selama tahun 2012 di Kalimantan permintaan benih kelapa sawit berjumlah 38.236.050 butir kecambah, dengan rincian Direktorat Jenderal Perkebunan 900.000 butir, Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 19.070.000 butir, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kertanegara sebanyak 3.130.000 butir, Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur sebanyak 13.605.550 butir, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Penajam Paser Utara sebanyak 1.020.500 butir. Dinas Perkebunan Kabupaten Berau sebanyak 500.000 butir dan Dinas Perkebunan Kabupaten Paser sebanyak 10.000 butir. Dari jumlah tersebut, maka penerimaan benih berjumlah lebih kurang 32.000.000 butir kecambah.
Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur telah menerbitkan SP2B-KS berjumlah 101 surat dengan permintaan benih sebanyak 19.070.000 butir kecambah.
Rekomendasi benih import yang diterbitkan sebanyak 4 surat dengan permintaan benih sebanyak 2.635.000 kecambah.

d. Pembinaan Waralaba Perbenihan dan Pengawasan PMUK

Dalam rangka mendukung penyediaan benih unggul dan bermutu di Kalimantan Timur sampai tahun 2012 terdapat 56 kelompok penangkar / waralaba benih perkebunan yaitu :

3. Paser (Kelapa Sawit 6 kelompok, Karet 12 Kelompok)
4. Penajam Paser Utara (Kelapa Sawit 3 Kelompok, Karet 5 Kelompok)
5. Balikpapan (Karet 5 Kelompok)
6. Samarinda (Kelapa Sawit 2 Kelompok)

7. Kutai Kertanegara (Kelapa Sawit 8 Kelompok)
8. Kutai Barat (Karet 3 Kelompok)
9. Kutai Timur (Kelapa Sawit 6 Kelompok)
10. Berau (Kakao 4 Kelompok)
11. Nunukan (Kelapa Sawit 2 Kelompok)

3. Dukungan Pelaksanaan Gernas kakao

Gerakan Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao Nasional adalah upaya percepatan peningkatan produktivitas tanaman dan mutu hasil kakao nasional dengan memberdayakan / melibatkan secara optimal seluruh potensi pemangku kepentingan maupun sumberdaya yang ada.

Tujuan Gerakan Nasional kakao adalah untuk memfasilitasi tercapainya target pelaksanaan kegiatan intensifikasi, rehabilitasi dan peremajaan tanaman kakao di 3 (tiga) Kabupaten . Pembiayaan untuk kegiatan Dukungan Pelaksanaan Gernas Kakao sebesar Rp. 664.945.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 201.579.100,- atau realisasi fisik sebesar 51,77 % dan keuangan sebesar 30,32 %. Adapun kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan adalah :

b. Pembentukan Tim Pembina dan Tim Pelaksana

Pembentukan Tim Pembina Program Pembangunan Perkebunan melalui Surat Keputusan Gubernur tersebut telah ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan Gernas Kakao melalui Kuasa Pengguna Anggaran / keputusan Kepala Dinas Perkebunan Nomor : 188.4/737/Prod-2012 tentang Penunjukkan dan penetapan honorarium pelaksanaan Gerakan Nasional (Gernas) Kakao Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2012

c. Penyusunan Juklak dan Juknis

Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis Gerakan Nasional Kakao ini dilaksanakan oleh Tim Penyusunan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 098/Kpts-Disbun/2012 tanggal 23 Maret 2012 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/2109/prod-2012, tanggal 27 april 2012.

Petunjuk Pelaksanaan ini disusun sebagai penjabaran dari Pedoman Umum yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Perkebunan yang secara garis besar berisi petunjuk tentang kegiatan peremajaan, kegiatan intensifikasi, Kegiatan Rehabilitasi, kegiatan pemberdayaan petugas dan petani, pembangunan dan operasionalisasi UPH dan Pengembangan system data base teknologi tanaman kakao

d. Identifikasi dan Inventarisasi Calon Lahan dan Calon Petani

Untuk kelancaran pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi CP/CL ini masing – masing Kabupaten telah ditunjuk Tim Pelaksana dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 082/Kpts-Disbun/2012 tanggal 7 Maret 2012 yang ditindak lanjuti dengan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/1473/Prod-2012 tanggal 9 Maret 2012 yang mempunyai tugas melakukan inventarisasi dan pendataan usulan CP/CL

kelompok tani peserta pada masing – masing wilayah untuk ditetapkan oleh Bupati; melakukan peninjauan lapangan secara periodic maunpun insidentil untuk memantau persiapan, perkembangan kegiatan dengan memberikan bimbingan / petunjuk kepada petugas lapangan dan petani peserta; Menginventarisir dan mengidentifikasi masalah – masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan Gernas Kakao; melaporkan hasil kegiatan masing – masing wilayah secara periodic kepada Kepala Dinas perkebunan Provinsi Kalimantan Timur

e. Kunjungan Belajar Ke Sentra produksi Kakao

Maksud dari kunjungan belajar tanaman kakao adalah mempelajari teknis pembibitan dan perbanyakan serta budidaya tanaman kakao dan menjajaki kemungkinan kerjasama penyediaan bibit kakao,
Dilaksanakan selama 4 hari yaitu pada tanggal 5 – 8 Oktober 2012 bertempat di PT. Inang Sari, kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat, Peserta yang mengikuti kunjungan adalah Kepala Bidang Produksi, kepala Seksi Bahan Tanaman, kepala Seksi Budidaya Tanaman dan Staf Bidang produksi.

f. Pembinaan dan Monitoring ke Kabupaten Penerima Paket

Kegiatan pembinaan dan monitoring dilakukan secara periodic dan insidentil ke Kabupaten Nunukan, malinau dan KAbupaten Berau
Adapun lokasi pelaksanaan pembinaan kegiatan Gernas Kakao tahun 2012 di Kalimantan Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Lokasi Pembinaan Gernas Kakao pada Tahun 2012

No	Kabupaten / Kecamatan	Kegiatan		
		Peremajaan	Rehabilitasi	Intensifikasi
1	Kab. Berau	300 Ha	200 Ha	400 Ha
	Kec. Teluk Bayur	73 Ha	100 Ha	35 Ha
	Kec. Gunung Tabur	95 Ha		44 Ha
	Kec. Sambaliung	86 Ha	42 Ha	126 Ha
	Kec. Kelay			196 Ha
	Kec. Segah	46 Ha	58 Ha	
2	Kab.. Malinau	100 Ha		400 Ha
	Kec. Malinau Utara	24 Ha		24 Ha
	Kec. Malinau Barat	75 Ha		75 Ha

	Kec. Mentarang	301 Ha		301 Ha
3.	Kab. Nunukan	300 Ha		500 Ha
	Kec. Sebatik	261 Ha		143 Ha
	Kec. Sebatik Barat	39 Ha		357 Ha
	Total	700 Ha	200 Ha	1.300

4. Revitalisasi Lada

Pada Tahun 2012 dialokasikan dana untuk pengembangan lada rakyat melalui kegiatan perluasan / rehabilitasi diwilayah yang potensial yaitu di Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur melalui dana APBN Tugas Pembantuan
Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan identifikasi dan inventarisasi calon petani dan calon lahan (CP/CL) pengembangan tanaman lada dan mempersiapkan calon petani / kelompok tani dan calon lahan yang akan diikutsertakan sebagai peserta revitalisasi tanaman lada
Pembiayaan untuk kegiatan revitalisasi lada sebesar Rp. 265.595.000,-dengan realisasi keuangan sebesar 92,84 % dan realisasi fisik sebesar 100 %.

Adapun kegiatan fisik yang dilaksanakan adalah :

a. Penyusunan Petunjuk Teknis Revitalisasi Lada

Dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 107/Kpts-Disbun/2012 tanggal 04 april 2012 yang ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/2669/Prod-2012 tanggal 28 april 2012, Tim ini mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Menyusun bahan dan data base mulai persiapan, pelaksanaan dan pemantapan langkah – langkah teknis operasional revitalisasi lada
2. Melakukan monitoring dan evaluasi pendataan petani lada yang dilaksanakan oleh pengumpul data di lapangan
3. Melaksanakan kompilasi data petani lada dan menyusun laporan hasul kegiatan
4. Melakukan pengawalan dan pembinaan kegiatan revitalisasi lada

b. Pengumpulan Data Sentra Produksi Lada

Tujuan pengumpulan data sentra produksi lada adalah untuk menyiapkan data base tanaman lada sebagai acuan untuk merumuskan program dan kegiatan pengembangan tanaman lada di Kalimantan Timur.
Lokasi pengumpulan data sentra produksi lada ini mencakup 3 Kecamatan sentra produksi lada yaitu :

1. Kecamatan Loa Janan (Kab. Kutai Kertanegara) di 2 (dua) desa yaitu Desa Batuah sebanyak 24 kelompok tani dan desa Tani Harapan sebanyak 4 kelompok tani

2. Kecamatan Samboja (Kab. Kutai Kertanegara) di 4 (empat) desa yaitu Desa Tani Bakti sebanyak 4 Kelompok tani, desa Karya Merdeka sebanyak 3 kelompok tani, desa Bukit Merdeka sebanyak 1 kelompok tani dan desa Sungai Merdeka sebanyak 1 kelompok tani
3. Kecamatan Sepaku (Kab. Penajam Paser Utara) di 7 (tujuh) desa yaitu Bukit Raya sebanyak 3 kelompok tani, desa tengin Baru sebanyak 14 kelompok tani, desa Wonosari sebanyak 7 kelompok tani, desa Semoi Dua sebanyak 20 kelompok tani, desa Argomulyo sebanyak 15 kelompok tani, desa Suko Mulyo sebanyak 13 kelompok tani dan desa Sukaraja sebanyak 3 kelompok tani

c. Penyusunan Sistem Informasi Sentra Produksi Lada

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Menyediakan materi visualisasi berupa data dan informasi perkembangan komoditi andalan perkebunan, dalam bentuk audio visual (VCD/DVD)
2. Menyediakan materi visualisasi berupa data dan informasi sentra produksi lada, dalam bentuk audio visual (VCD/DVD) dan media cetak
3. Menyebarluaskan informasi tentanh potensi pengembangan komoditi unggulan serta peluang investasi sektor perkebunan di Kalimantan Timur melalui media elektronik dan cetak

Sumber data dan gambar untuk pengisian audio visual tersebut diambil di beberapa lokasi sentra pengembangan tanaman lada di beberapa Kabupaten / Kota se- Kalimantan Timur

Master bahan audio visual tersebut dibuat dalam VCD dengan format (dat./Mpeg) dan digandakan sebanyak 50 keping yaitu 25 keping versi Inggris dan 25 keping versi Indonesia.

d. Pembuatan Bahan Informasi

Dalam rangka penyebar luasan informasi tentang perkebunan, telah dilaksanakan pembuatan beberapa bahan informasi cetak yaitu :

1. Bokklet dengan judul "Budidaya Tanaman lada yang Baik" sebanyak 600 buku dan "Petunjuk Teknologi Tanaman Lada " sebanyak 500 buku
2. Leaflet dengan judul " Budidaya Tanaman Lada" sebanyak 2.000 lembar dan "Pengolahan Lada" sebanyak 2.000 lembar

e. Pertemuan Sosialisasi

Dalam rangka penerapan teknologi budidaya lada yang baik (GAP for pepper) Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur bekerjasama dengan IPC pada tanggal 13 s/d 15 Juli 2012 telah melaksanakan sosialisasi kepada petani dan kelompok tani di Kabupaten Kutai kertanegara dan kabupaten Penajam Paser Utara

Maksud dan tujuan dari pertemuan sosialisasi adalah untuk memberikan penjelasan kepada petani dan petugas tentang :

1. Meningkatkan produksi dan produktivitas
2. Meningkatkan mutu hasil termasuk keamanan konsumen
3. Meningkatkan efisiensi produksi dengan memanfaatkan sumberdaya alam semaksimal mungkin
4. Memperbaiki / mempertahankan kesuburan lahan dan kelestarian lingkungan
5. Memotivasi petani dan kelompok tani untuk memiliki sikap yang bertanggung jawab terhadap kesehatan dan keamanan diri serta lingkungan

6. Meningkatkan peluang penerimaan produk lada oleh pasar internasional
7. Memberi jaminan keamanan terhadap konsumen

Peserta sosialisasi seluruhnya berjumlah 150 orang yang terdiri dari : Di desa Batuah Kec. Loa Janan , di desa Sungai Merdeka, Kec. Samboja dan di Desa Suko Mulyo, Kec. Sepaku

f. Kunjungan belajar

Maksud dan tujuan dari kunjungan belajar tanaman lada adalah :

1. Mempelajari teknis pengembangan dan budidaya tanaman lada di provinsi Lampung mulai penyediaan bibit, budidaya sampai dengan pasca panen
2. Mempelajari sistem pembiayaan dan sumber – sumber pembiayaan yang mendukung pengembangan tanaman lada
3. Mempelajari sistem kelembagaan, pemasaran dan penyiapan SDM petani pada pengembangan tanaman lada

Pelaksanaan kunjungan belajar dilaksanakan selama 4 (empat) hari yaitu dari tanggal 3 s/d 6 Oktober 2012.
Tempat kunjungan belajar adalah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur dan Sentra produksi lada di wilayah binaan Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung
Peserta yang mengikuti kunjungan belajar berjumlah 5 (lima) orang yaitu Kepala Bidang Produksi, Staf Seksi Bahan Tanaman, Staf Seksi Bahan Tanaman, Staf Seksi Alat dan Mesin Perkebunan dan Staf Seksi Budidaya Tanaman.

5. Inventarisasi Plasma Nutfah dan Pembinaan BPT

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

1. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya plasma nuftah tanaman perkebunan sebagai sumber daya genetik penting yang perlu dijaga dan dilestarikan keberadaannya di Kalimantan Timur
2. Mendorong dilakukannya identifikasi dan inventarisasi plasma nuftah perkebunan di daerah, meliputi penyebaran, potensi, status kelangkaan, upaya pelestarian dan pemanfaatannya
3. Meningkatkan pengetahuan dan wawasan petugas tentang sumberdaya genetik dengan mengikuti Pelatihan dan apresiasi tentang Pelestarian dan pemanfaatan plasma nuftah
4. Mengevaluasi kelayakan dan potensi sumber benih untuk batang bawah yang telah ditentukan
5. Menetapkan sumber benih biji batang bawah baru yang lebih unggul dan tersedia sesuai kebutuhan diberbagai wilayah sentra pengembangan tanaman karet

Pembiayan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 283.720.000,- yang terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 233.720.000,- dan APBD Perubahan sebesar Rp. 50.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar 66,74 % (APBD Murni) dan 88,77 % (APBD Perubahan, dan realisasi fisik 69,55% (APBD Murni) dan 91 % (APBD Perubahan)
Kegiatan yang dilaksanakan meliputi :

a. Pembuatan Bahan Informasi

1. Berupa Booklet dengan judul " Petunjuk Teknis Tata Cara Pemurnian Benih kakao" disusun dan dicetak sebanyak 500 buku dan Pedoman Teknis Budidaya Kelapa Sawit" disusun dan dicetak sebanyak 500 buku
2. Berupa Leaflet dengan judul "Petunjuk Pelaksanaan Rehabilitasi Tanaman Kakao" dicetak sebanyak 2.000 lembar dan "Pemanfaatan benih Unggul Kelapa Dalam" dicetak sebanyak 2.000 lembar
3. Pengadaan Majalah / Buletin Media Perkebunan setiap bulan sebagai bahan informasi yang berkaitan dengan pengembangan perkebunan

b. Penyusunan Bahan Informasi dan Promosi Perkebunan

Pembuatan bahan visualisasi melalui multimmedia (dalam bentuk audio visual (VCD) berdurasi 10 – 12 menit) yang digandakan sebanyak 35 keping yang dimaksudkan untuk memudahkan penyediaan data base perencanaan perkebunan, informasi plasma nuftah dan penyediaan informasi potenasi wilayah serta peluang investasi sektor perkebunan di Kalimantan Timur.

c. Pengelolaan dan pengolahan Lahan Demplot Plasma Nuftah

Dilaksanakan pada acara PENAS XVII di Kecamatan Tenggarong Seberang, Kabupaten Kutai Kertanegara tanggal 18 s/d 22 Juni 2012 seluas lebih kurang 2 Ha, yang terdiri dari berbagai percontohan tanaman antara lain Kelapa sawit dipadukan tanaman kedele; karet tumpang sari dengan cangkok manis; tanaman lada dengan tanaman arachis pintoi, tanaman Nilam dan tanaman karet dengan tebu tigu

d. Pemeliharaan Demplot Tanaman Aren

Pada tahun 2009 telah dibangun demplot tanaman aren seluas kurang lebih 1,0 hektar tanaman aren di desa Batuah Kec. Loa Janan. Pada daerah tersebut ditanami beberapa jenis (klon) tanaman aren yang diperleh berdasarkan hasil eksplorasi oleh Dinas Perkebunan di 3 Kabupaten / Kota yaitu Kutai kertanegara, Kota Samarinda dan Paser.

e. Kegiatan Seminar / Lokakarya

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan wawasan anggota Komisariat Daerah dan Kelompok Kerja, secara nasional telah diagendakan pertemuan apresiasi oleh Komisariat Nasional 9Komnas). Peserta Apresiasi berasal dari Komisariat Daerah (Komda) beberapa Provinsi dan Kabupaten / Kota di Pulau Jawa dan Kalimantan.

f. Pembinaan Blok Penghasil Tinggi Tanaman Perkebunan

Dalam rangka pembinaan Blok penghasil tinggi tanaman perkebunan telah dilakukan upaya – upaya antara lain :

1. Penilaian dan penetapan kebun sumber biji batang bawah karet dengan kegiatan evaluasi dan survei blok kebun dan penilaian calon kebun
2. Survei Blok Penghasil Tinggi Tanaman Kelapa yang dipengaruhi oleh faktor produksi tinggi, luas pertanaman minimal 1 tahun, bebas serangan hama dan bebas serangan penyakit berbahaya serta melakukan seleksi pohon induk.

6. Monitoring, Pengawasan dan Evaluasi Alsin

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

a. Untuk mengetahui alat dan mesin yang dibutuhkan oleh petani
b. Memfasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan kelompok tani tentang alat dan mesin perkebunan
c. Menginvetarisasi ketersediaan dan kebutuhan alat dan mesin pada wilayah sentra produksi

Pembiayan untuk kegiatan ini adalah sebesar Rp. 88.200.000,- yang terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 33.200.000,- dan APBD Perubahan sebesar Rp. 50.000.000,- adapun realisasi keuangan 98,40% (APBD Murni) dan 93,57% (APBD Perubahan) dan untuk realisasi fisik sebesar 100%.

Kegiatan Fisik yang sudah dilaksanakan adalah :

1. Monitoring, pengawasan dan evaluasi alat mesin perkebunan
   Pemanfaatan alat dan mesin perkebunan masih belum optimal dan dilapangan masih dijumpai peralatan pasca panen dan pengolahanhasil yang belum dioperasionalkan dengan baik disebabkan karena perencanaan pengadaan alsin belum sesuai dengan kebutuhan di lapangan, keterbatasan kemapuan pengelola dan belum berfungsinya eklembagaan, belum lengkapnya prasarana/sarana pendukung seperti perbengkelan dn suku cadang dan kendala teknis dan keterbatasan penguasaan teknologi petani serta ketersediaan bahan baku

2. Pelatihan Alat mesin perkebunan bagi kelompok tani
   Dasar pelaksanaan ini berdsarkan Surat keputusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan timur Nomor 188.4/273/Kpts-Disbun/2012, tanggal 14 November 2012
   Maksud dan tujuan dilaksanakn pelatihan ini adalah :
   - Mempelajari secara teknis penggunaan alat dan mesin dalam penanganan pasca panen
   - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani dalam penggunaan alat dan mesin perkebunan, khususnya pada tanaman lada
   - Mengubah cara kerja pengolahan hasil dari yang tradisional menjadi modern

   Pelatihan dilaksanakan selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 27 Desember 2012 di desa Sukomulyo (desa Semoi III) Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara dengan diikuti peserta 25 orang yang berasal dari pengurus kelompok tani, PPL Kec. Sepaku dan asosiasi petani lada, nara sumber berasal Kepala Bidang Produksi Disbun Prov. Kaltim, Kepala Unit Pelaksana Teknis Lada Kec. Loa Janan Kab. Kukardan Produsen Alat Pengering Lada (PT. Fadhel Teknis, Bogor)

4. Bidang Bina Usaha Tani

Bidang Bina Usaha Tani mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengawasan pemanfaatan sumberdaya, permodalan ketenagakerjaan dan kewirausahaan, pengolahan data usaha serta klasifikasi usaha perkebunan, menyusun tata cara terhadap perijinan dan pemberian ijin usaha di bidang

perkebunan serta rekomendasi dalam pemberian ijin usaha perkebunan dan pembukaan lahan, membina/mengawasi perkembangan perusahaan perkebunan dan lembaga usaha, membina dan mengawasi usaha kecil, menengah dan koperasi serta kemitraan usaha perkebunan.

Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2012 adalah :

1. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Pada kegiatan ini terdapat 4 sub kegiatan dengan jumlah pagu dana sebesar Rp. 431.066.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 382.485.250,-dengan realisasi fisik sebesar 95 % dan realisasi keuangan seesar 88,73%, dengan perincian kegiatan sebagai berikut :

a. Temu Usaha Pembangunan Perkebunan (TUPP)

- Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap proses usaha perkebunan dan pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan usaha perkebunan serta program revitalisasi perkebunan yang berkelanjutan baik dari aspek ekonomi, sosial dan lingkungan terhadap pelaku usaha perkebunan.
- Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 29 Maret 2012 di Hotel ASTON Balikpapan yang diikuti oleh Pejabat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Dinas Perkebunan Kabupaten / Kota se- Kalimantan timur, para pelaku usaha (PBS/PBN) kelapa sawit, dengan jumlah peserta sebanyak 110 orang; Temu Usaha Pembangunan Perkebunan 9TUPp) dengan PT. AGRICINAL yang dilaksanakan di ruang rapat Havea Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dan Temu usaha Pembangunan Perkebunan (TUPP) dengan PT. Tri Tunggal Central Buana yang dilaksankanan di ruang rapat Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur tanggal 17 Oktober 2012 yang diikuti oleh 25 Orang peserta dan narasumber.
- Hasil dari pertemuan :
  - Pengembangan perkebunan melalui program revitalisasi perkebunan dengan fasilitas kredit perbankan serta bunga subsidi dari Pemerintah merupakan salah satu upaya strategis untuk mendukung program sejuta hektar kelapa sawit bagi masyarakat yang bermitra dengan perusahaan perkebunan
  - Agar kedepan jangan ada lagi TBS kelapa sawit terbuang karena belum dibangunnya Pabrik Minyak Kelapa Sawit (PMS) yang mengolah TBS
  - Kerjasama antara PBS dan koperasi adalah kemitraan yang harus dilakukan agar tertib dan untuk kepentingan hajat hidup orang banyak
  - Harga yang digunakan adalah ketetapan dari TIM TBS kelapa sawit Kalimantan timur
- Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 73.850.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 38.800.000,- atau realisasi fisik sebear 100 % dan realisasi keuangan sebesar Rp. 52,54%

b. Pembinaan Monitoring Kegiatan Usaha Perkebunan

- Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan upaya pembinaan terhadap pelaksanaan rencana dan realisasi usaha pembangunan perkebunan di Kabupaten / Kota
- Hasil dari dari pelaksanaan kegiatan :

- Termonitornya perkembangan (kinerja) rencana / realisasi setiap usaha pembangunan perkebunan di wilayah Kabupaten / Kota
- Terjalin upaya yang kondusif dalam mendukung usaha pembangunan perkebunan berkelanjutan di setiap wilayah Kabupaten / Kota
- Perusahaan yang dilakukan kegiatan monitoring oleh Tim Dinas Perkebunan Prov. Kaltim adalah Kabupaten Kutai Kertanegara yang terdiri dari PT. Muara Kaman Sawit Sejahtera 1, PT. Muara Kaman Sejahtera 2, PT. Kembang Janggut Sawit Sejahtera, PT. Rimba Rayatama Jaya, PT. Himalaya, PT. Bina Graha Utama Makmur, PT. Perkebunan Kaltim Utamadan PT. Sawit Golden Prima; Kabupaten Kutai Barat yang terdiri dari PT. Fangiono Agro Plantation, PT. Kalimantan Green Persada, PT. Marsam Citra Adiperkasa, PT. Borneo Bakti Sejahtera, PT. Keham Agro Sejahtera, PT. Nusa Sumber Rezeki, PT. Makro Flora Indah Alami, PT. Aquatic Sungai Berombang; Kabupaten Paser yang terdiri dari PT. Langgai Agrindo Agung, PT. Nusa Lestari, PT. Bumi Pasir Agrindo, PT. Sena Bangun Aneka Pertiwi, PT. Pucuk Jaya; Kabupaten Nunukan yang terdiri dari : PT. Bulungan Hijau Perkasa, PT. Sebaung Sawit Plantations, PT. Nur Adilah, PT. Laura Segar Jaya, PT. Tirta Madu Sawit Jaya, PT. Palm Segar Lestari, PT. Primabahagia Permai Sejati; Kabupaten Bulungan yang terdiri dari : PT. Pipit Mutiara Lestari, PT. Dharma Intisawit Lestari, PT. Bulungan Surya Mas Pratama, PT. Prima Bahagia Permai; Kabupaten Tana Tidung yang terdiri dari : PT Tana Lia Nusantara dan Kabupaten Berau yang terdiri dari : PT. Buana Maduantara dan PT. Anugerah Surya Mandiri

➢ Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 242.716.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 241.343.250,- atau realisasi fisik sebear 100 % dan realisasi keuangan sebesar 99,4 %

c. Rapat Koordinasi Pembangunan Usaha Pekebun

➢ Kegiatan ini bertujuan untuk menggali beberapa informasi peluang dan dukungan terhadap usaha perkebunan di Kabupaten / Kota, khususnya yang terkait dengan proses perijinan serta terarahnya pelaksanaan kegiatan usaha perkebunan yang berkelanjutan (ekonomi, sosial dan lingkungan)

➢ Hasil dari dari pelaksanaan kegiatan :
- Terjalinnya pemahaman bagi paara pemegang kebijakan/pelaku usaha untuk mendukung pembangunan perkebunan berkelanjutan di Kabupaten / Kota sehingga tersusunnya mekanisme kerja sebagai acuan dalam mendukung proses pembangunan usaha perkebunan di Kabupaten / Kota.
- Terupdatenya data realisasi pembangunan perkebunan di wilayah Kabupaten Paser. Penajam Paser Utara, Kutai Kertanegara dan Kutai Barat

➢ Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 14.500.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 13.662.000,- atau realisasi fisik sebear 100 % dan realisasi keuangan sebesar 94,2 %

d. Rapat Koordinasi Mekanisme Pembangunan Usaha Perkebunan (APBD-Perubahan)

➢ Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kualitas sumberdaya aparatur dan pihak swasta dalam memahami dan menerapkan mekanisme pembangunan usaha perkebunan

➢ Kegiatan dilaksanakan tanggal 24 Nopember 2012 di Grand Jatra Hotel Balikpapan yang diikuti oleh 120 orang berasal dari Dinas Perkebunan Provinsi, Kabupaten dan Perusahaan Besar Swasta yang ada di Kalimantan Timur, dengan narasumber dari BPN Provinsi Kalimantan Timur, BKPM Pusat dan Dirjen Perkebunan.

- Hasil dari dari pelaksanaan kegiatan menghasilkan beberapa rumusan sebagai berikut :
  - Proses permohonan ijin usaha perkebunan, baik terhadap proses IUP, IUP-B dan IUP-P hendaknya mengacu kepada Permentan Nomor 26 tahun 2007 dan Peraturan Daerah Kabupaten / Kota
  - Dalam mengantisipasi terjadinya tumpang tindih lahan dengan sektor lain atau hak – hak masyarakat atas lahan, hendaknya menggunakan sistem informasi data spasial (GIS).
  - Pemahaman atas kriteria tanah terlantar hendaknya mengacu terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2012
  - Pemerintah daerah menyusun kajian kelayakan (minimal Pra-FS) tentang insentif dalam investasi yang ditawarkan untuk mendukung agribisnis perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan
  - Sesuai dengan Permentan No. 07/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan
  - Penilaian usaha kebun akan dimulai tahun 2012 dengan biaya penilaian yang dibebankan pada APBD dan APBN
  - Perusahaan yang tidak bersedia dinilai dinyatakan kelas E atau Kelas V dan perusahaan kelas D dan kelas E atau kelas IV dan kelas V dalam jangka waktu peringatan belum dilaksanakan saran tindak lanjut, izin usaha perkebunannya akan diusulkan dicabut
  - Untuk kebun yang berpredikat kelas I, Kelas II dan kelas III dapat mengajukan permohonan untuk dilakukan audit agar dapat diterbitkan sertifikat Indonesia Susitainable Palm Oil (ISPO)
  - Sistem pelaporan perkembangan kinerja usaha perkebunan hendaknya disampaikan ke Kab / Kota setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan Disbun Prov. Kaltim dan Ditjen Perkebunan
  -

Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 88.680.000,- atau realisasi fisik sebear 90,71 % dan realisasi keuangan sebesar 88,7 %

2. Kegiatan Promosi atas Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan Unggulan Daerah

Kegiatan pada satuan kerja perangkat daerah Dinas Perkebunan provinsi Kalimantan Timur pada bidang Usaha Tani yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

a. Expo dan Pameran

- Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana promosi dan komunikasi langsung dalam upaya menjalin hubungan dagang, investasi dan kerjasama yang baik
- Pelaksanaan kegiatan expo dan pameran diikuti sebanyak 6 kali yang teridiri dari 3 pameran lokal dan 3 pameran luar daerah yaitu sebagai berikut :
  - Pameran dalam daerah lokal : Kaltim Fair dlaksanakan tanggal 2 s/d 8 Pebruari 2012, Pameran PENAS 2012 dilaksanakan tanggal 18 s/d 23 Juni bertempat di Tenggarong Kabupaten Kutai Kertanegara, Kaltim Expo 2012 dilaksanakan tanggal 22 s/d 26 September 2012 bertempat di Stadion Segiri Samarinda

- Expo dan Pameran Luar Daerah : Agrinex International Expo 2012 tanggal 4 s/d 6 Maret 2012 di Jakarta Convention Centre, Agro and Food Expo 2012 tanggal 26 s/d 29 Mei 2012 di Jakarta Convention Centre, Surabaya Agribisnis Expo 2012 tanggal 20 Juli s/d 24 Juli 2012 di Grand City Convex Surabaya.
- Batam Agribisnis Expo 2012 tanggal 10 s/d 13 Nopember 2012 di Mega Mall Batam Centre.

➢ Hasil dari kegiatan adalah masyarakat / pelaku usaha dan petani semakin tertarik tentang prospek pengembangan komoditi – komoditi unggulan perkebunan baik di dalam maupun di luar Provinsi Kalimantan Timur

Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 276.100.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 269.645.112,- atau realisasi fisik sebear 100 % dan realisasi keuangan sebesar 97,66 %

3. Kegiatan Pengolahan Informasi Permintaan Pasar Hasil Produksi Pertanian / Perkebunan

Pada kegiatan ini terdapat 3 sub kegiatan dengan jumlah pagu dana sebesar Rp. 371.150.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 335.529.000,-dengan realisasi fisik sebesar 96,30 % dan realisasi keuangan seesar 90,40%, dengan perincian kegiatan sebagai berikut:

a. Pengembangan Sistem Pemasaran

➢ Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan sistem layanan informasi, baik terhadap harga maupun standar kualitas produk serta alamat calon pelaku usaha produk perkebunan, melalui berbagai media masa

➢ Hasil Pelaksananaan kegiatan
Pengembangan sistem pemasaran yang telah dilaksanakan dititik beratkan pada 6 Kabupaten / Kota dalam rangka monitoring sistem pemasaran dan merupakan daerah yang memiliki salah satu komoditi unggulan. Ada 7 komoditi perkebunan yang dihasilkan oleh petani pekebun diantaranya karet meliputi lump bersih dan lump kotor, kakao meliputi kakao fermentasi dan tanpa : fermentasi, kopi robusta, kelapa biji dan kopra, lada hitam dan lada putih, kemiri kupas dan TBS kelapa sawit..

➢ Untuk harga TBS bisa dipantau karena ditetapkan oleh Tim penetapan harga Provinsi Kaltim berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor : 525/K.402/2010 tanggal 9 Agustus 2010. Penentuan harga TBS kelapa sawit di Kalimantan Timur dilaksanakan setiap bulan

Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 250.400.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 231.828.700,- atau realisasi fisik sebear 98,9 % dan realisasi keuangan sebesar 90,40 %

b. Monitoring Sistem Upah dan Tenaga Kerja Perkebunan

➢ Kegiatan ini bertujuan untuk menganalisa aspek makro ekonomi ketenagakerjaan dalam pengembangan komoditas utama sektor perkebunan dan mengakomodasikan informasi upah minimum dari sektor perkebunan yaitu mengenai standar upah yang ditetapkan oleh Provinsi Kalimantan Timur untuk diterapkan oleh perkebunan besar swasta terhadap tenaga kerja perkebunan.

➢ Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah tercapainya kesejahteraan dan keamanan para tenaga kerja terutama buruh – buruh di perkebunan yang mendapat upah minimum sesuai dengan keputusan upah minimum Provinsi..

➢ Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 30.750.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 30.518.500,- atau realisasi fisik sebear 100 % dan realisasi keuangan sebesar 98,20 %

c. Bimtek Petani Kelapa (Coconut Bio Desel) di Kecamatan Biduk – Biduk

a. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pelatihan secara teknis tentang cara mengoperasikan mesin UPH coconut biodesel serta mengoptimalkan kembali peralatan UPH tersebut
b. Kegiatan Bimtek dilaksanakan di Kecamatan Biduk – Biduk Kabupaten Berau tanggal 22 s/d 23 Nopember 2012, narasumber berasal dari Dinas Perkebunan Prov. Akltim, Dinas Perkebunan Kabupaten Berau dan Narasumber dari PT. Pura Barutama sebagai suplayer mesin UPH coconut biodesel. Peserta Bimtek adalah petani kelapa yang ada di kecamatan Biduk – biduk dengan jumlah peserta 25 orang.
c. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mengetahui dan memahami cara pembuatan coconut biodesel

➢ Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 90.000.000,- dan terrealisasi sebesar Rp. 73.181.800,- atau realisasi fisik sebear 100 % dan realisasi keuangan sebesar 81,31%

4. Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Penyuluh Pertanian Perkebunan

a. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan upaya percepatan pelaksanaan pembangunan usaha perkebunan melalui pola kemitraan yang didukung dengan kredit perbankan serta pencapaian yang sudah dilaksanakan dan dievaluasi segala kekurangannya untuk mencapai hasil yang lebih baik, agar dapat dioptimalkan pengelolaan perkebunan secara berkelanjutan

b. Hasil Pelaksanaan Kegiatan :

- Sistem management satu atap atap sistem siklus tanam kelapa sawit (25-30 tahun). Penilaian kebun plasma adalah legalitas pengesahan Bank kepada petani jadi tidak ada konversi
- Kebun plasma non Revitalisasi unit costnya jadi besar ada Rp. 48.000.000 per hektar, sedangkan Ditjenbun Rp. 40.000.000/ha
- Pembinaan kelembagaan petani (koperasi) diharapkan kepada Pemda Kabupaten perlu melakukan pengawasan, pembinaan, evaluasi, kebersamaan dan perhatian dengan adanya PPh 25 % Undang – undang perpajakan tahun 2008.
- Dari pertemuan koordinasi revitalisasi didapat hasil klarifikasi jumlah luasan kebun dan jumlah KK petani dari beberapa Kabupaten sebagai berikut :
  1) Kabupaten Kutai Timur
     a) PT. Swakarsa melaksankan program plasma non revit 837,48 ha dan 264 KK
     b) PT. Dharma Agrotama Nusantara melaksanakan program plasma non revit 267,40 ha dan 92 KK
     c) PT. Dharma Inti Sawit Nugraha melaksanakan program plasma non revit 1.174 ha dan 537 KK
     d) PT. Dewata Sawit Nugraha melaksanakan program plasma non revit 249,44 ha dan 139 KK
  2) Kabupaten Bulungan
     a) PT. Citra Sawit Lestari membangun kebun inti seluas 2.510,53 ha dan kebun plasma seluas 344,21 ha
  3) Kabupaten Paser
     a) PT. Senabangun Aneka Pertiwi kebun inti 10.566 ha kebun plasma 2.500 ha
     b) PT. Pradiksi Guna Tama kebun inti 10.566 ha kebun plasma 1.550 ha
     c) PTPN XIII kebun inti 19.076 ha kebun plasma 23.984 ha, untuk kebun plasma revit sudah tanam 1.310 ha dengan 675 KK

d) PT. Saraswanti Sawit Makmur kebun inti 1.770 ha dan kebun plasma 320 ha dengan 160 KK
e) PT. Agro Inti Kencanamas kebun inti 4.250 ha kebun plasma 1.600 ha, realisasi 1.300 ha dengan 675 KK
f) PT. Pelita Makmur Niaga kebun inti 1.400 ha dan plasma 598 ha jumlah KK 299
g) PT. Gawi Makmur kebun inti 4.000 ha rencana kebun plasma 600 ha realisasi 374 ha
h) PT. Multi Jayantara Abadi kebun inti 2.800 ha kebun plasma 360 ha

- Jumlah Pagu Anggaran sebesar Rp. 120.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 91.152.400,- atau realisasi fisik sebear 88,90 % dan realisasi keuangan sebesar 75,65 %. Sampai dengan Tahun 2012 jumlah kebun plasma dan kebun inti pada lampiran 5.

PROGRAM REVITALISASI PERKEBUNAN DI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2012

Program Revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman kelapa sawit, karet, dan kakao yang didukung kredit investasi perbankkan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan di bidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil.

Pencapaian program revitalisasi perkebunan di provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 adalah 20.107,26 Ha, 9.766 KK dan realisasi sebesar 787.714.521,- baik itu pola kemitraan maupun pola non kemitraan. Petugas pendamping di provinsi Kalimantan Timur tahun 2012 berjumlah 37 orang yang terdiri dari 20 orang Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) yang merupakan lulusan sarjana dan 17 orang pembantu lapang petugas tenaga kontrak pendamping yang merupakan lulusan SLTA atau sederajat.

Penyebaran petugas pendamping di provinsi Kalimantan Timur tahun 2010 adalah :

- Kabupaten Nunukan 3 Org PLP – TKP
- Kabupaten Bulungan 1 Org TKP
- Kabupaten Berau 1 Org TKP dan 1 Org PLP – TKP
- Kabupaten Paser 3 Org TKP dan 4 Org PLP – TKP
- Kabupatenn PPU 2 Org TKP dan 2 Org PLP – TKP
- Kota Samarinda 2 Org TKP
- Kabupaten Kutai Kartanegara 2 org TKP dan 1 Org PLP – TKP
- Kabupaten Kutai Timur 5 Org TKP dan 8 Org PLP – TKP
- Kabupaten Kutai Barat 1 Org TKP dan 1 Org PLP – TKP

Kendala yang dihadapi dalam program revitalisasi perkebunan di Kalimantan Timur antara lain :

- Kurangnya pemahaman terhadap program revitalisasi perkebunan khususnya stakeholder di kab/kota dan proses persyaratan administrasi (calon plasma, calon lahan dan calon perusahaan mitra) oleh pemerintah kabupaten terhambat.

- Sulitnya petani untuk memenuhi persyaratan perbankkan khususnya pada pola non kemitraan.
- Tingginya biaya sertifikasi lahan dan terbatasnya tenaga untukproses sertifikasi.
- Tingkat bunga 6% untuk karet, 7 % untuk kakao dan Kelapa Sawit
- Infrastruktur yang kurang mendukung.
- Kurangnya tenaga kontrak pendamping (TKP) dan masih rendahnya kemampuan Tenaga Kontrak Pendamping tersebut.
- Masih banyak perusahaan yang mengabaikan kewajiban membangun kebun plasma 20% (Permentan 26 Tahun 2007 Pasal 11) untuk dijadikan kebun kemitraan dengan masyarakat sekitar karena tidak ada sanksi
- Masalah sengketa lahan desa yang belum selesai sehingga dalam penyusunan SK CP /CL oleh Pemerintah Kabupaten

Upaya percepatan Program Revitalisasi Perkebunan

- Pemahaman Program Revitalisasi Perkebunan kepada seluruh pihak terkait, secara khusus terhadap lembaga keuangan daerah untuk lebih berperan dalam pemahaman bahwa perkebunan merupakan bisnis jangka panjang dengan basis bisnis yang solid
- Perlunya komitmen dan konsistensi dari semua pihak dalam pemenuhan persyaratan pembiayaan revitalisasi perkebunan
- Koordinasi antara instansi pemda, terutama untuk penetapan petani dan perusahaan mitra, RTRW dan sertifikasi lahan
- Perusahaan mitra, koperasi dan petani peserta secara proaktif segera melengkapi persyaratan administrasai dan segera mengajukan permohonan KPEN-RP ke Bank
- Lahan petani yang belum memiliki sertifikat perlu adanya kepastian status kepemilikan
- Penyelesaian sengketa batas desa

5. Bidang Bina Perlindungan Tanaman

Bidang Bina Perlindungan Tanaman mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan koordinasi informasi dan introduksi tentang pemakaian pestisida serta peralatan pengendalian organisme pengganggu tanaman perkebunan, membina dan membimbing manajemen teknis mengenai pengamatan, peramalan, pencegahan dan pengendalian organisme pengganggu tanaman, operasional pengendalian dan bimbingan manajemen lingkungan serta melakukan perlindungan kebun dari penjarahan, okupasi lahan serta penanganan konflik PBS dengan masyarakat sekitarnya. Secara rinci kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 sebagai berikut :

1. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada Petani Tindak Lanjut Kecamatan Sepaku Kabupaten penajam Paser Utara

   Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah : Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petani peserta SL dalam menganalisis kebun, merehabilitasi kebun, memproses hasil olahan komoditi perkebunan sesuai standar Nasional Indonesia (SNI), dalam memasarkan produk usaha lainnya dan meningkatkan posisi tawar (bergaining position) kelompok petani diantara para pelaku dan pengendali pemasaran komoditas perkebunan
   Dilaksanakan pada tanggal 20 April s/d 20 Juni 2012 (8 kali pertemuan) di Desa Semoi II, Kecamatan Sepaku Kab. Penajam Paser Utara dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah petani memahami proses pengolahan hasil kakao dari mulai pemetikan, perendaman, pengolahan menjadi bubuk kakao yang berkualitas dan siap dipasarkan. Selain itu pelatihan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pemahaman petani mengenai agro-ekosistem menuju terlaksananya 4 prinsip dasar PHT yaitu : Budidaya tanaman sehat, melestraikan musuh alami, pengamatan sekali perminggu dan petani menjadi ahli PHT

2. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Lada Petani Murni Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah : Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petani peserta SL dalam menganalisis kebun, merehabilitasi kebun, memproses hasil olahan komoditi perkebunan sesuai standar Nasional Indonesia (SNI), dalam memasarkan produk usaha lainnya dan meningkatkan posisi tawar (bergaining position) kelompok petani diantara para pelaku dan pengendali pemasaran komoditas perkebunan
Dilaksanakan pada tanggal 8 April s/d 8 Agustusi 2012 di Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.yaitu kelompok Tani Mario dan Kelompok Tani Beringin Jaya

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah petani memahami proses pengolahan hasil kakao dari mulai pemetikan, perendaman, pengolahan menjadi bubuk kakao yang berkualitas dan siap dipasarkan.

3. Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SL-PHT) Tanaman Kakao di Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah : Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan keterampilan petani peserta SL dalam menganalisis kebun, merehabilitasi kebun, memproses hasil olahan komoditi perkebunan sesuai standar Nasional Indonesia (SNI), dalam memasarkan produk usaha lainnya dan meningkatkan posisi tawar (bergaining position) kelompok petani diantara para pelaku dan pengendali pemasaran komoditas perkebunan.

Dilaksanakan pada tanggal 21 Mei s/d 24 September 2012 di Desa Maspul dan Desa Sei. Nyamuk Kecamatan Sebatik Kabupaten Nunukan. Diikuti sebanyak 75 orang.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah petani memahami proses pengolahan hasil kakao dari mulai pemetikan, penjemuran, perendaman dan pengolahan menjadi bubuk kakao yang berkualitas dan siap dipasarkan.

4. Pengawasan Peredaran Pestisida dan Pestisida Residu Pada Produk Perkebunan

Tujuan dari kegiatan ini adalah memperoleh data penggunaan pestisida yang beredar di Kabupaten / Kota, diketahuinya pestisida yang sudah habis izin edarnya dan memperoleh data jenis pestisida (tidak memenuhi standar mutu yang beredar di Kalimantan Timur)
Bahwa pelaksanaan dan peredaran pestisida di Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur dapat dilaksanakan secara rutin tetapi masih belum maksimal dengan adanya kunjungan langsung ke lapangan diharapkan dapat memberikan gambaran bahwa peredaran melalui distributor atau pengecer yang sudah ditunjuk, koordinator pestisida dan informasi ini dapat diketahui oleh masyarakat umum akan berbahaya apabila penggunaanya tidak sesuai aturan dapat membahayakan kesehatan manusia, kelestraian sumber daya alam hayati dan lingkungan hidup.

5. Monitoring AMDAL PBS se-Kalimantan Timur

Tujuan dilaksanakan kegiatan ini adalah mengumpulkan segala informasi yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan perkebunan di Kalimantan Timur yang selanjutnya akan dijadikan bahan pengolahan dan analisi oleh instansi terkait dengan kegiatan pembangunan dan pengembagan kebun dan pabrik

Hasil yang diharapkan adalah tersedianya data dan informasi tentang pengendalian dampak lingkungan dalam usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan perkebunan – perkebunan besar di Kalimantan Timur dan sebagai bahan dasar dalam mengeluarkan kebijakan / rekomendasi bagi instansi terkait terhadap pelaksanaan pengelolaan lingkungan pada perusahaan perkebunan

6. Pelatihan Pengendalian Kebakaran Lahan dan Kebun Bagi Petugas Kabupaten / Kota Se Kalimantan Timur Tahun 2012

Tujuan dari kegiatan ini adalah meningkatkan koordinasi dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran lahan dan kebun di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, meningkatakan kapasitas kelembagaan dan memberdayakan SDM petugas kebakaran di Kabupaten / Kota, meningkatkan inovasi dan diseminasi tepat guna, Meningkatkan sarana dan prasarana dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan kebakaran di wilayahnya.

Peserta berasal dari petugas Kabupaten / Kota se Kalimantan Timur yaitu Dari Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur, Petugas Dinas yang mebidangi perkebunan Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur dan Petugas Perusahaan Perkebunan Besar se-Kalimantan Timur yang ditetapkan sesuai dengan Keuptusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 188.4/258/KPTS-Disbun/2012 tanggal 10 Oktober 2012 yang diikuti sebanyak 40 orang yeng terdiri dari Kabupaen Kota Kalimantan Timur, pelaksanaan dilaksanakan selama 3 (tiga) hari pada tanggal 17 – 19 Oktober bertempat di Hotel Grand Jamrut 2 Samarinda dan Kebun Raya UNMUL Samarinda KRUS Samarinda. Alokasi dana bersumber dari APBD sebesar Rp. 112.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.576.000,-

Hasil yang diharapkan adalah petugas pengendali kebakaran lahan dan kebun, mampu memberikan petunjuk dan pembinaan kepada masyarakat yang akan melakukan pembukaan lahan tanpa bakar, mampu mendeteksi adanya Hot Spot (titk api_ yang timbul di Kabupaten/Kota dengan menggunakan satelit dan petugas dapat lebih mengenal fungsi, jenis dan kegunaan alat – alat pemadam kebakaran.

7. Pertemuan Koordinasi Pengendalian Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan gerak langkah instansi terkait dan perusahaan Besar Swasta dalam upaya pencegahan kebakaran lahan dan kebun serta mengukur seberapa jauh kekuatan di lapangan dalam upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran seperti peralatan dan kesiapansiagaan perusahaan

Peserta yang mengikuti adalah Instansi Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi, Asosiasi Petani dan Perusahaan Perkebunan, GAPKI, LSM, Perguruan Tinggi. Pelaksanaan dilaksanakan pada tanggal 12 Juli 2012 di Hotel Sagita Balikpapan. Dana bersumber dari Dana DIPA Satker (05) Disbun Prov. Kaltim Rp. 36.700.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 33.071.500,-

Hasil yang diharapkan adalah Perusahaan perkebunan harus memperhatikan dan mentaati peraturan dan Undang undang Nomor 18 tahun 2004, Perusahaan perkebunan akan melaksanakan PLTB dan pemadaman bila ada Hot Spot / kebakaran di kawasan usaha masing–masing dan sekitar lokasi perkebunan dan menyiapkan sarana dan prasarana dalam upaya pengendalian kebakaran hutan / kebun dan lahan

8. Fasilitasi Penanggulangan GUP dan Bencana Alam

Tujuan dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengawasan kegiatan pembangunan usaha perkebunan kabupaten / kota se kalimantan Timur, memfasilitasi petugas Dinas Perkebunan Provinsi ke Kabupaten, mamntau dan monitoring kasus-kasu Gangguan Usaha perkebunan di Kalimantan timur, persamaan persepsi dan gerak langkah dalam upaya penanggulangan gangguan usaha perkebunan baik identifikasi faktor penyebab terjadinya gangguan usaha di tingkat lapangan
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan April s/d Nopember 2012 pada Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur

Hasil yang diharapkan adalah terinvetarisir data kasus gangguan usaha perkebunan di Kabupaten / Kota se Kalimantan timur, adanya solusi dalam upaya penanggulangan gangguan usaha dan mengoptimalkan pengawasan pada perusahaan perkebunan besar terhadap gangguan usaha perkebunan

9. Pertemuan Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP)

Tujuan dari kegiatan ini adalah menyamakan persepsi dan gerak langkah dalam upaya penanggulangan gangguan usaha perkebunan bantara dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, perusahan perusahan perkebunan (PTPN dan PBS), instansi terkait dan masyarakat
Dilaksanakan pada tanggal 13 Juli 2012 di Hotel Sagita Balikpapan dengan peserta yang berasal dari Instansi Pemerintah, LSM, Perguruan Tinggi Perusahan – perusahaan perkebuanan, Asosiasi Petani. Dengan dana bersumber dari DIPA Satker (05) dengan jumlah dana sebesar Rp. 37.300.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 34.551.500,-
Hasil yang diharapkan adalah terinvetarisir data kasus gangguan usaha perkebunan di Kabupaten / Kota se Kalimantan timur, adanya solusi dalam upaya penanggulangan gangguan usaha dan mengoptimalkan pengawasan pada perusahaan perkebunan besar terhadap gangguan usaha perkebunan

10. Fasilitasi Pengendalian / Pemantauan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim Kalimantan Timur

Tujuan dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di IUPHHK dan ijin usaha lainnya terhadap Perusahaan Besar Swasta, mematau kebakaran yang dilakukan lebih dini (Early Warning), melakukan ground ckeck ke lokasi, lapangan jika terjadi kasus kebakaran dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten / Kota dalam pemantauan, pengenalian kebakaran
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan April s/d Nopember 2012 pada Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur

Hasil yang diharapkan adalah Terlaksanaya pengecekan lahan / kebun yang terbakar, tersusunnya laporan perkembangan kebakaran secara berkala dan laporan pemantauan pengendalian kebakaran lahan dan kebun di Kalimantan Timur.

11. Fasilitasi Pengendalian / Pemantauan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Paser

Tujuan dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di IUPHHK dan ijin usaha lainnya terhadap Perusahaan Besar Swasta, mematau kebakaran yang dilakukan lebih dini (Early Warning), melakukan ground ckeck ke lokasi, lapangan jika terjadi kasus kebakaran dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten / Kota dalam pemantauan, pengenalian kebakaran
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni s/d Nopember 2012 pada Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur

Hasil yang diharapkan adalah Terlaksanaya pengecekan lahan / kebun yang terbakar, tersusunnya laporan perkembangan kebakaran secara berkala dan laporan pemantauan pengendalian kebakaran lahan dan kebun di Kalimantan Timur

12. Fasilitasi Pengendalian / Pemantauan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Tana Tidung

Tujuan dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di IUPHHK dan ijin usaha lainnya terhadap Perusahaan Besar Swasta, mematau kebakaran yang dilakukan lebih dini (Early Warning), melakukan ground ckeck ke lokasi, lapangan jika terjadi kasus kebakaran dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten / Kota dalam pemantauan, pengenalian kebakaran
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni s/d Nopember 2012 pada Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur

Hasil yang diharapkan adalah Terlaksanaya pengecekan lahan / kebun yang terbakar, tersusunnya laporan perkembangan kebakaran secara berkala dan laporan pemantauan pengendalian kebakaran lahan dan kebun di Kalimantan Timur

13. Fasilitasi Pengendalian / Pemantauan Kebakaran dan Dampak Perubahan Iklim di Kabupaten Bulungan

Tujuan dari kegiatan ini adalah pembinaan dan pengawasan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di IUPHHK dan ijin usaha lainnya terhadap Perusahaan Besar Swasta, mematau kebakaran yang dilakukan lebih dini (Early Warning), melakukan ground ckeck ke lokasi, lapangan jika terjadi kasus kebakaran dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait di Kabupaten / Kota dalam pemantauan, pengenalian kebakaran
Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan Juni s/d Nopember 2012 pada Kabupaten / Kota se-Kalimantan Timur

Hasil yang diharapkan adalah Terlaksanaya pengecekan lahan / kebun yang terbakar, tersusunnya laporan perkembangan kebakaran secara berkala dan laporan pemantauan pengendalian kebakaran lahan dan kebun di Kalimantan Timur

14. Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan Peraturan Perundang – undangan di Kabupaten Tana Tidung

Tujuan dari kegiatan ini adalah Memfasilitasi petugas Dinas Perkebunan/ Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi pada masyarakat / pekebun, agar masyarakat patuh dan taat pada aturan Undang – undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan mengetahui sanksi yang berlaku dan agar masyarakt dalam pembukaan lahannya tidak dilakukan dengan cara membakar dan menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan 16 September 2012 di tempat Pertemuan UPPT Sesayap SP 3 Desa Persiapan Trans-Kujau Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang diikuti sebanyak 30 orang yang terdiri dari petani dan pekebun setempat.

Hasil yang diharapkan adalah dapat diketahui dan memahami UU no. 18 Tahun 2004, petani / pekebun dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara tidak melakukan pembakaran lahan

15. Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan Peraturan Perundang – undangan di Kabupaten Paser

Tujuan dari kegiatan ini adalah Memfasilitasi petugas Dinas Perkebunan/ Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi pada masyarakat / pekebun, agar masyarakat patuh dan taat pada aturan Undang – undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan mengetahui sanksi yang berlaku dan agar masyarakt dalam pembukaan lahannya tidak dilakukan dengan cara membakar dan menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan 10 Mei 2012 di Gedung PKK Jl. Jend. Sudirman Kabupaten Paseryang diikuti sebanyak 30 orang yang terdiri dari petani dan pekebun setempat.

Hasil yang diharapkan adalah dapat diketahui dan memahami UU no. 18 Tahun 2004, petani / pekebun dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara tidak melakukan pembakaran lahan

16. Sosialisasi Pembukaan Lahan Tanpa Bakar (PLTB) dan Peraturan Perundang – undangan di Kabupaten Bulungan

Tujuan dari kegiatan ini adalah Memfasilitasi petugas Dinas Perkebunan/ Dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten dalam melaksanakan sosialisasi pada masyarakat / pekebun, agar masyarakat patuh dan taat pada aturan Undang – undang Nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan dan mengetahui sanksi yang berlaku dan agar masyarakt dalam pembukaan lahannya tidak dilakukan dengan cara membakar dan menerapkan pembukaan lahan tanpa bakar (PLTB)

Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan pada bulan 15 Juli 2012 di lokasi kebun petani Desa Pimping Kecamatan Tanjung Palas Utara Kabupaten Bulungan yang diikuti sebanyak 30 orang yang terdiri dari petani dan pekebun setempat.

Hasil yang diharapkan adalah dapat diketahui dan memahami UU no. 18 Tahun 2004, petani / pekebun dalam melakukan pembukaan lahan dengan cara tidak melakukan pembakaran lahan

6. UPTD P2TP (Pengembangan dan Perlindungan Tanaman Perkebunan)

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengkajian, Pengembangan dan Perlindungan Tanaman (UPTD P3TP) adalah :

a. Menyelenggarakan uji laboratorium dan uji lapang pengendalian hama penyakit dan gulma/Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
b. Mengembangkan teknologi pengamatan dan pengendalian hama, penyakit dan gulma/organisme pengganggu tanaman;
c. Melaksanakan eksplorasi, identifikasi, inventarisasi dan pengembangan agensia hayati;
d. Mengembangkan dan melaksanakan uji penggunaan bio pestisida;
e. Melakukan uji coba penentuan ambang toleransi dan kerugian hasil akibat serangan hama, penyakit dan gulma (OPT);
f. Melakukan uji lapang dalam rangka seleksi tanaman yang tahan terhadap hama penyakit dan gulma (OPT);
g. Melakukan uji laboratorium dan uji lapang aplikasi pestisida kimiawi serta dampaknya terhadap agroekosistem;
h. Menyelenggarakan kerja sama dan koordinasi dengan institusi sejenis;
i. Menyiapkan dan menyebarkan bahan informasi teknologi tepat guna di bidang perlindungan tanaman;

j. Menyelenggarakan uji system budidaya tanaman perkebunan yang spesifik lokasi dalam rangka meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan OPT;
k. Melaksanakan urusan ketatausahaan.

Pada tahun 2012 Pagu anggaran UPTD P2TP adalah Rp. 1.822.866.500,- dengan realisasi keuangan Rp. 1.612.880.338 dengan realisasi fisik 99,96 % dengan realisasi keuangan 89,00 %.

Kegiatan yang telah dilaksanakan UPTD P2TP pada tahun 2012 adalah :

a. Sosialisasi Pemanfaatan Jamur Trichoderma SP untuk Pengendalian Penyakit Busuk Pangkal Batang (BPB) pada tanaman Lada

Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Suko Mulyo, Kec. Sepaku Semoy, Kab. Penajam Paser Utara pada tanggal 13 Juni 2012 yang diikuti sebanyak 20 orang.
Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan penggunaan agenshayati dan pengenalan penyakit Busuk Pangkal Batang Lada kepada petani, Jamur Trichoderma SP untuk mengendalikan atau mencegah penyakit Busuk Pangkal Batang Lada, agar petani mau dan mampu membuat Jamur Trichoderma SP sendiri secara sederhana, agar petani mau dan mampu membuat Jamur Trichoderma SP sendiri secara sederhana danaplikasi penggunaan Jamur Trichoderma SP pada tanaman lada dan ramah lingkungan baik bagi manusia maupun ternak peliharaan.
Harapan dari kegiatan ini dapat menurunkan tingkat serangan penyakit busuk pangkal batang tanaman lada milik petani sehingga pendapatan petani akan meningkat dan sekaligus pemenuhan kebutuhan pasar.

b. Pemeliharaan lanjutan kebun Pestisida Nabati

Lokasi kebun kegiatan berada di Loa Janan KM 19 jalan raya Samarinda – Balikpapan (Kab. Kutai Kartanegara) disamping UPPT Loa Janan, adapun luas kebun Pesnab tersebut adalah 0,5 Ha
Kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi :
- Pengendalian gulma dan belukar : pengendalian gulma dilakukan dengan cara mekanik dan menggunakan herbisida
- Pemupukan dilakukan berdasarkan dosis yang dianjurkan baik terhadap jenis tanaman dan umur tanaman serta jenis pupuk terutama menggunakan pupuk organik
- Koleksi tanaman berupa pohon mimba, pohon kemiri, pohon mindi, tanmana sirsak, pohon pinang, buah bolok, sirih, gadung

Output yang dihasilkan terpeliharanya kebun pestisida nabati di KM. 19 Loa Janan, Kab. Kukar.

c. Sosialisasi Pemanfaatan Jamur Metharizium untuk Pengendalian Hama Orycetes pada Tanaman Kelapa Dalam

Melakukan sosialisasi pada kelompok tani Tunas Harapan (20 orang) di Desa Suka Damai, Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah meliputi : Menyiapkan lokasi sosailisasi dan calon petani dan calon lahan serta mengadakan survey lokasi tanaman kelapa yang terserang hama kumbang kelapa, menyiapkan bahan dan alat yang dugunakan untuk sosialisasi dan aplikasi; Mencari sarang yang ada larva kumbang kelapa; dan melakukan penyebaran jamur Metarhizium anisopliae pada sarang

Hasil yang diharapkan adalah terputusnya daur hidup kumbang kelapa Orycetes rhinoceros yang menyerang tanaman kelapa dengan matinya larva sehingga tidak menimbuilkan kerugian hasil bagi petani dan menurunnya tingkat serangan kumbang kelapa Oryctes rhinoceros di kebun milik kelompok tani Tunas Harapan (20 orang) di Desa Suka Damai Kec. Teluk Pandan Kab. Kutai Timur.

d. Kegiatan Pengembangan Agens Pengendali Hayati

Maksud dari kegiatan ini adalah sebagai tindakan preventif atau pencegahan terhadap serangan OPT pada komoditi perkebunan.
Kegiatan yang telah dilaksanakan hingga saat ini adalah :

- Pembuatan biakan murni untuk dijadikan isolat dengan bahan dari agar PDA
- Pemurnian isolat untuk dijadikan starter jamur dan bahan yang digunakan adalah beras menir, jagung giling dan bekatul
- Adapun jamur yang dikembangkan adalah Jamur Trichoderma harzianum untuk mengendalikan penyakit Busuk Pangkal Batang (BPB) pada tanaman lada, Jamur koningli untuk mengendalikan penyakit jamur akar putih (Rigidoporus lignosus) pada tanaman karet., Jamur Metarhizium anisopliae untuk mengendalikan hama Orycetes rhinoceros pada tanaman kelapa dalamdan kelapa sawit.

Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah mendapatkan stater Agens Pengendali Hayati yang ramah lingkungan untuk pengendalian OPT tanaman perkebunan.

e. Uji Efektifitas Jamur Trichoderma Sp untuk Pengendalian JAP (Jamur Akar Putih) pada Tanaman Karet

Penyakit jamur akar putih (JAP) disebabkan oleh ***Rigidoporus Lignosus*** merupakan penyakit penting karena dapat menyebabkan kematian pada tanaman.
Kegiatan yang dilaksanakan :

- Menyiapkan lokasi uji dengan mengadakan survey lokasi dan pengamatan tanaman yang terserang Jamur Akar Putih (JAP) pada Kelompok Tani Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser
- Menyiapkan bahan dan alat yang digunakan untuk Aplikasi
- Menyiapkan leaflet kultur teknis tanaman karet dan pengendalian JAP (Jamur Akar Putih)
- Melakukan aplikasi jamur Trichoderma koningii di kebun milik petani
- Pengamatan pasca aplikasi dengan hasil sementara sudah menunjukkan berkurangnya serangan

f. Kegiatan Pengendalian Penyakit Ganggang Pirang pada Tanaman Lada di Desa Batuah /RDR Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara seluas 25 Hektar sebanyak 25 orang petani

Hasil identifikasi di lapangan oleh para pakar rempah Indonesia dan UPTD P2TP Disbun Prov. Kaltim, tersebut berkesimpulan bahwa tanaman lada di Desa Batuah / RDR Kec. Loa Janan Kab. Kukar terserang penyakit Jamur ganggang pirang atau Septobasidium bogoriensis.
Kegiatan yang telah dilaksanakan adalah :

- Identifikasi (Metode Surveilens), di kebun lada milik kelompok tani Baru yaitu Bapak Harding pada bilan Nopember, berdasarkan hasil identifikasi ternyata tanaman lada tersebut terserang penyakit jamur ganggang pirang.
- Melakukan sosilisasi dan aplikasi sample (tanggal 21 November 2012)
- Melakukan Pencegahan (Bulan November dan Desember 2012)

- Melakukan Pengendalian / Penanggulangan
- Melakukan Penyemprotan fungsida sistemik Victory Mix sebanyak 3 gram/liter air dengan interval waktu 2 minggu sekali
- Melakukan monitoring dan evaluasi

Harapan dari kegiatan ini dalah agar tanaman lada yang terserang akan pulih dan berdampak pada peningkatan penghasilan petani lada serta terpenuhinya permintaan pasar

g. Pelatihan Pembuatan Jamur Trichoderma Sp untuk pengendalian OPT perkebunan bagi petani dan petugas se Kaltim

Peserta pelatihan sebanyak 20 orang yang berasal dari 9 Kabupaten / Kota (Kukar, Paser, Bontang, Saarinda, Penajam Paser Utara, Berau, Tarakan dan Kutai Timur)
Pelatihan dilaksanakan selama 2 (dua) hari dari tanggal 14 s/d 15 September 2012 di UPTD Pengembangan Perlindungan TanamanPerkebunan Samarinda
Hasil yang diharapkan adalah tersedianya petani / petugas teknis yang mempunyai kemampuan / pengetahuan dan mampu membuat APH Tricohderma SP secara mandiri dan aplikasinya serta mensosialisasikan di tigkat lapangan.

h. Pelatihan Perbanyakan dan Penggunaan APH / Jamur Trichoderma Sp bagi Petani pembuatan untuk pengendalian Busuk Pangkal Batang (BPB) pada tanaman Lada di Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara

Peserta pelatihan sebanyak 35 orang petani lada di Desa Batuah Kec. Loa Janan Kab. Kutai Kertanegara dan pelatihan dilaksanakan di UPP Loa Janan

i. Pengendalian OPT Perkebunan

Kegiatan ini termasuk kegiatan pengamatan dan identifikasi serangan OPT yang muncul di Kabupaten / Kota hingga pengendalian dan penanggulangan sekplosi OPT yaitu :

- Identifikasi Penyakit Layu Kalimantan di Desa Suka Damai Kec. Teluk Pandang Kab. Kutai Timur
- Identifikasi penyakit baru pada tanaman kelapa sawit di Kab. Paser
- Identifikasi penyakit ganggang Pirang pada tanaman lada di Desa Batuah / RDR Kec. Loa Janan Kab. Kukar
- Penanggulangan Eksplosi hama ulat bulu bersama sama dengan Dinas Tanaman Pangan prov. Kaltim di desa Berukang Kec. Anggana Kab. Kukar pada tanaman Rambai Laut
- Penanggulangan hama Artona pada tanaman kelapa dalam milik petani seluas 3 Ha di desa Aisu Kec. Tanjung Isuy Kab. Kutai Barat.

j. Pertemuan Teknis Petugas Pengamat OPT se Kaltim

Dilaksanakan di UPTD P2TP Disbun Prov. Kaltim Samarinda dengan jumlah peserta sebanyak 18 orang se Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada bulan Desember 2012 dimana narasumber berasal dari Direktorat Perlindungan Perkebunan Jakarta, Disbun Prov. Kaltim, Badan Lingkungan Hidup Prov. Kaltim. Dan UPTD P2TP Disbun Prov. Kaltim. Materi yang disampaikan adalah Kebijakan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan timur, Kebijakan Perlindungan Tanaman di Kalimantan Timur, Implementasi Pelayanan Publik UPTD P2TP, Penyusunan Rencana Tindak Lanjut Pengendalian OPT di Kaltim, serta pengenalan alat proteksi perlndungan tanaman dan aplikasinya di lapangan

k. Konsultasi Petugas Pengamat OPT

Kegiatan ini bertujuan untuk mensinkronkan kegiatan perlindungan perkebunan yang ada di daerah dengan kegiatan yang ada di Provinsi.
Output yang diperoleh adalah terlaksananya kegiatan konsultasi Petugas Pengamat OPT dari Kabupaten / Kota ke Provinsi

l. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan ini bertuuan untuk memonitor dan mengevaluasi kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan, termasuk memonitor kegiatan Gernas kakai dari segi OPTnya di tiga lokasi.

7. UPTD T2P (Teknologi Terapan Perkebunan)

Berdasarkan SK Gubernur Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2001 UPTD Stasiun Pengkajian Teknologi Terapan Perkebunan mempunyai tugas pokok Membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Perkebunan Provinsi. Kalimantan Timur khususnya pengkajian teknologi terapan perkebunan serta melaksanakan tugas-tugas pembantuan yang bersifat menunjang kegiatan pegkajian teknologi terapan perkebunan. Dan berdasatrkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur no. 20 Tahun 2009 tanggal 25 Pebruari 2009 mempunyai fungsi :

a. Menyusun rencana teknis organisasi teknologi terapan budidaya dan pengolahan hasil perkebunan
b. Pelaksana kebijakan teknis operasional teknologi terapan budidaya dan pengolahan hasil perkebunan
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan teknologi terapan budidaya dan pengolahan hasil perkebunan
d. Pengelolaan mesin ketat usahaan
e. Pembinaan kelompok jabatan fungsional
f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada Tahun Anggaran 2012 UPTD Tehnologi Terapan melaksanakan kegiatan dengan mendapat dana sebesar Rp. 2.235.410.000,- yang terdiri dari biaya rutin dan biaya pembangunan dengan capaian realisasi sebesar Rp. 1.717.092.026,- dengan realisasi fisik sebesar 91,93% dan realisasi keuangan sebesar 76,81%.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2012 adalah sebagai berikut :

1. Pembenahan kegiatan kedalam, antara lain :
   a. Penambahan barang-barang inventaris UPTD yang diperlukan untuk operasional dan kelancaran tugas berupa Notebook, lemari, meja, kursi, AC
   b. Pembenahan administrasi dan keuangan
   c. Peningkatan SDM bagi pegawai dengan mengikutsertakan dalam berbagai pelatihan dan kursus
2. Penyusunan Rencana kerja 2012 untuk kegiatan UPTD Tehnologi Terapan Perkebunan
3. Monitoring komoditi Tanaman Perkebunan
4. Inventarisasi dan Evaluasi Tanaman Pohon Jati

5. SL – PHT Lada
6. Pembinaan Kakao di Pulau Sebatik
7. Pengambilan sample biji coklat untuk pembuatan pasta kakao
8. Pendampingan Petani Tahun Anggaran 2012
9. Inventarisir Barang Kantor Stasiun Terapan Lada Loa Janan
10. Pemeliharaan Kebun kelapa kopyor seluas 1 (satu) Ha di KM. 41 Loa JananPemeliharaan kebun lada di KM. 41 dan KM. 38 Loa Janan Kabupaten Kutai Kertanegara
11. Pemeliharaan Kebun Demplot Jarak di KM. 36
12. Pemeliharaan Kebun Entres Karet KM. 36
13. Pengembangan Demplot Tanaman Aren di KM. 36 Loa Janan
14. Pengembangan Demplot Tanaman Nilam di Loa Janan KM. 41
15. Pelatihan Pengolahan Bubuk dan Pasta Kakao yang dilaksanakan di UPTD Teknologi Terapan Perkebunan pada bulan Maret 2012
16. Pelatihan Pengolahan Minyak Atsiri dilaksanakan di UPTD Teknologi Terapan Perkebunan pada bulan Mei 2012
17. Peningkatan Mutu Hasil Produk Pertanian
18. Ikut serta dalam even – even pameran / seminar / pelatihan / lokakarya / pertemuan teknis baik lokal maupun luar daerah
19. Laporan hasil kegiatan tahunan / dokumentasi dan pengarsipan administrasi UPTD Teknologi Terapan Perkebunan

8. UPTD PBP (Pengawasan Benih Perkebunan)

Tugas pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih Perkebunan adalah membantu Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur dalam bidang pengawasan, pengujian mutu benih perkebunan dan melaksanakan tugas-tugas yang bersifat menunjang kegiatan pengawasan serta pengujian mutu benih perkebunan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2012 adalah sebagai berikut :

a. Pokja Plasmanutfah Perkebunan;
b. Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih/Bibit Perkebunan.
c. Pengujian Mutu dan Sertifikasi Benih;
d. Pengelolaan Benih/Bibit Tanaman Perkebunan di Rumah Kaca.

Kegiatan Pengembangan Perbenihan / Pembibitan

1. Tujuan kegiatan ini adalah untuk melaksanakan pengawasan peredaran dan sertifikasi mutu benih / bibit tanaman perkebunan yang akan digunakan dalam pembangunan perkebunan di Kalimantan Timur

2. Sasarannya adalah pengawasan peredaran dan sertifikasi serta penggunaan benih oleh masyarakat, Perusahaan Besar Swasta, Perusahaan Besar Negara dan proyek – proyek pemerintah dan peningkatan SDM petugas Pengawas Benih Perkebunan di Kabupaten / kota se Kaltim
3. Hasil yang diharapkan adalah berkurangnya peredaran benih ilegal di Kaltim, Diperolehnya benih / bibit tanaman perkebunan unggul dan memenuhi standar mutu yang layak edar di masyarakat dan diperolehnya hasil perlakukan benih / bibit tanaman perkebunan yang sesuai standar mutu.

Realisasi fisik dan keuangan kegiatan UPTD P2BP Disbun Kaltim, terdiri dari :

- Anggaran Rutin :
  - Belanja tidak langsung : Rp. 485.020.000,-, realisasi sebesar Rp. 348.310.000,- (71.81 %), fisik 100 %
  - Belanja langsung : Rp. 1.016.250.000.,- realisasi sebesar Rp. 690.532.625,- (67,95 %) ,fisik 100 %
  - Pengemb.Perbenihan/ : Rp. 523.260.000,- realisasi sebesar Rp. 453.714.884,- Pembibitan (86,71 %) ,fisik 100 %

  - Total Anggaran APBD melalui kegiatan Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Disbun Kaltim tahun 2012 sebesar Rp. 2.024.530.000,-

Realisasi keuangan s/d Desember adalah Rp. 1.492.557.509,- (73,72 %), fisik (100 %). Sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar Rp. 531.972.491,-.

B. Pelaksanaan Kegiatan Bersumber Dana dari APBN :

Pada tahun 2012 Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan dana pembangunan yang bersumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp. 33.817.886.000,- terdiri dari Rp. 2.646.304.000,- untuk provinsi (Dekonsentrasi) dan Rp. 31.171.582.000,- untuk Dana Tugas Pembantuan (Tugas Pembantuan Provinsi dan Kabupaten).

Dana tersebut berasal dari 3 (tiga) Direktorat yang berada pada Kementerian Pertanian yaitu Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian serta dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.

1. Direktorat Jenderal Perkebunan (Ditjenbun)

Pada tahun 2012 Direktorat Jenderal Perkebunan (Dirjenbun) mengalokasikan dana untuk kegiatan pembangunan perkebunan baik dana dekonsentrasi (DK) maupun Tugas Pembantuan (TP) adalah sebesar Rp. 26.951.886.000,- yang terbagi menjadi :

Dekonsentrasi	:	Rp. 1.365.304.000,-
TP Provinsi	:	Rp. 16.502.476.000,-
TP Kab. Malinau	:	Rp. 1.642.530.000,-
TP Kab. Nunukan	:	Rp. 2.404.860.000,-
TP Kab. Kutai Barat	:	Rp. 813.906.000,-
TP Kab. Nunukan	:	Rp. 3.619.020.000,-
TP Kab. PPU	:	Rp. 603.790.000,-

Kegiatan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 1.365.304.000,- meliputi :

Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan :

a. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Semusim
b. Dukungan Perlindungan Perkebunan
c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Provinsi sebesar Rp. 16.502.476.000,- meliputi :

Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan meliputi:

a. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Rempah dan Penyegar yang meliputi :
   - Peremajaan Tanaman Kakao (700 Ha) : Kab. Berau (300 Ha), Kab. Malinau (100 Ha) dan Kab. Nunukan (300 Ha)
   - Rehabilitasi Kakao (250 Ha) : Kab. Berau (200 Ha)
   - Intensifikasi Kakao (1750 Ha) : Kab. Berau (400 Ha), Kab. Malinau (400 Ha) dan Kab. Nunukan (500 Ha)
   - Pemelihraan Klon Tanaman Kakao tahan PBK (1 Ha) di Kab. Kukar
b. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Tahunan meliputi :
   - Sinkronisasi dan Koordinasi Kegiatan Revitalisasi Perkebunan
   - Pengawalan Kegiatan Revitalisasi Perkebunan 8.784 Ha. Di Kutim
   - Operasional Petugas Pendamping Revitalisasi Perkebunan (37 Orang)

c. Pengembangan Penanganan Pasca Panen Komoditi Perkebunan;
d. Dukungan Perlindungan Perkebunan
e. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Perkebunan Peningkatan Kapabilitas Pegawai

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten sebesar Rp. 9.084.106.000,- meliputi :

Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau (Rp. 1.642.530.000,-)
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan :
- Perluasan, Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao
  1. Peremajaan Tanaman Kakao 100 Ha; (Realisasi 100 Ha)
  2. Intensifikasi Tanaman Kakao 400 Ha; (Realisasi 400 Ha)

Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Nunukan (Rp. 2.404.860.000,-)
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan :
- Perluasan, Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao
  1. Peremajaan Tanaman Kakao 300 Ha; (Realisasi 300 Ha)
  2. Intensifikasi Tanaman Kakao 800 Ha; (Realisasi 500 Ha)

Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat (Rp. 813.906.000,-)
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan :
Perluasan Tanaman Karet di Daerah Perbatasan, Wilayah Pasca Konflik, Teringgal dan bencana Alam (145 Ha)

Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Berau (Rp. 3.619.020.000,-)
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan :
- Perluasan, Peremajaan, Rehabilitasi dan Intensifikasi Tanaman Kakao
  1. Peremajaan Tanaman Kakao 300 Ha; (Realisasi 300 Ha)
  2. Rehabilitasi Tanaman Kakao 250 Ha (Realisasi 200 Ha)
  3. Intensifikasi Tanaman Kakao 550 Ha; (realisasi 400 Ha)

Sattker Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Barat (Rp. 813.906.000,-)
Program Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan :
Perluasan Tanaman Lada seluas 41 Ha di Desa Semoi Kec. Sepaku

secara keseluruhan pencapaian dari satuan kerja Ditjenbun baik dana Dekonsentrasi maupun Tugas Pembantuan adalah sebesar Rp. 21.991.523.831,- (81,60%) untuk realisasi keuangan dengan realisasi fisik sebesar 91,45%

2. Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP)

Kegiatan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (07) tahun 2012 yang dialokasikan pada Dana Dekonsentrasi di Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur sebesar Rp. 681.000.000,- dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 585.420.450,- (85,96%) dan dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 900.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 876.916.800,- terbagi atas :

Tabel 13. Realisasi Anggaran Kegiatan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) T.A. 2012.

No.	Kegiatan	Jumlah Peserta	Lokasi Pelaksanaan Kegiatan	Pagu Dana	Realisasi	%
	Dekonsentrasi			**681.000.000**	**585.420.450**	**85.96**
1.	Pelatihan SLPPHP PUA Kakao	50 org (petani) & pelaku usaha	Kutim dan Berau	40.000.000	39.987.500	100
2.	Temu Usaha Perkebunan pada PENAS KTNA	1.050 org (komoditi karet, k. Sawit, kopi dan kakao)	Kab. Kukar	20.000.000	19.176.500	100
3.	Mengikuti Promosi pada PENAS KTNA		Kab. Kukar	10.000.000	10.000.000	100
4.	Mengikuti Promosi Dalam Negeri (Pameran di Jakarta, Surabaya dan Batam)		Jakarta, Surabaya dan Batam	175.000.000	162.955.950	93.11
5.	Bimtek Penerapan Jaminan Mutu Bokar	25 org	Kab. Kukar	21.000.000	19.225.000	91.54
6.	Pertemuan Sosialisasi Kegiatan PPHP	40 org	Disbun Prov.	7.500.000	5.604.200	74.72

7.	Pertemuan Evaluasi Pemasaran, Pengolahan Hasil dan Usaha Perkebunan	80 org	Balikpapan	23.800.000	21.014.000	88.29
	Tugas Pembantuan			**900.000.000**	**876.917.000**	**97.43**
1.	Pertemuan Bimtek Bokar	45 org	Kubar	20.250.000	20.250.000	100
2.	Pertemuan Bimtek Bokar	45 org	Kukar	20.250.000	20.250.000	100

Pada tahun 2012 terdapat anggaran Belanja Bantuan sosial dengan anggaran Rp. 636.000.000,- dengan realisasi Rp. 634.685.000,- atau 99,79%.

Dana Bantuan social TA. 2012 diberikan kepada 11 Kelompok Tani di 2 Kabupaten yang ada di Kalimantan Timur yaitu di Kabupaten Kutai Kertanegara 6 Kelompok Tani dan Kabupaten Kutai Barat 5 Kelompok Tani. Mendapat Bantuan Sosial kegiatan Pengembangan Industri Bokar yang dananya berupa transfer uang ke kelompok sasaran penerima bantuan social yang ditetapkan dengan Keuptusan Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 188.4/160/Kpts-Disbun/2012 tanggal 19 Mei 2012

Tabel 14. Daftar Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial :

No	Nama Kelompok Tani	Desa / Kecamatan	Jumlah Bantuan Sosial (Rp)
1.	Bina Usaha Tani I	Kampung Empas Kec. Melak Kab. Kubar	63.625.000,-
2.	Sinar Harapan II	Kp. Sri Mulyo Kec. Sekolaq Darat kab. Kubar	71.260.000,-
3.	Mekar Sari II	Kp. Rejo Basuki Kec. Barong Tongkok Kab. Kubar	50.900.000,-
4.	Sumber Maju I	Kp. Muut Kec. Nyuatan Kab. Kubar	50.900.000,-
5.	Sumber Maju II	Kp. Muut Kec. Nyuatan Kab. Kubar	50.900.000,-
6.	Maju Makmur I	Desa Prangat Selatan Kec. Marangkayu Kab. Kukar	23.140.000,-
7.	Maju Makmur II	Desa Perangat Selatan Kec. Marangkayu Kab. Kukar	28.925.000,-

8	Rukun Tani	Desa Perangat Selatan Kec. Marangkayu Kab. Kukar	28.925.000,-
9.	Mekar Jaya	Desa Perangat Selatan Kec. Marangkayu Kab. Kukar	109.915.000,-
10.	Makarti Jaya	Desa Perangat Selatan Kec. Marangkayu Kab. Kukar	127.270.000,-
11.	Sumber Tani	Desa Perangat Selatan Kec. Marangkayu Kab. Kukar	28.925.000,-

3. Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP)

Kegiatan Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur (08) pada tahun 2012 ini sudah menginjak tahun yang ke 6 (enam) dengan jumlah anggaran yang diberikan untuk untuk dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan mencapai Rp. 5.285.000.000,- . Pola Pembiayaan kegiatan Satker Dinas Tugas Pembantuan adalah Bantuan Sosial (Bansos), dimana dana kegiatan tersebut dialokasikan pada Rekening Kelompok Sasaran dan dikelola oleh Kelompok tani/sasaran sesuai dengan kebutuhan dan unit cost dilapangan/wilayah setempat yang dituangkan dalam Rencana Kerja/Belanja dalam bentuk Rencana Usaha Kegiatan Kelompok (RUKK).

Dengan rincian sebagai berikut :

Dekonsentrasi : Rp. 600.000.000,-
TP Kab. Nunukan : Rp. 695.000.000,-
TP Kab. Kutai Kertanegara : Rp. 1.805.000.000,-
TP Kab. PPU : Rp. 1.350.000.000,-
TP Kab. Malinau : Rp. 835.000.000,-

Kegiatan Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 600.000.000,- meliputi :

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi : :

a. Administrasi Kegiatan
b. Penyusunan Program dan Rencana Kerja / Teknis / Program
c. Pengembangan Sistem Database Kakao
d. Penyelenggaraan Akutandi dan Informasi
e. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten sebesar Rp. 4.685.000.000,- meliputi :

Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Nunukan (Rp. 695.000.000,-) (100%)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi :

- Pengelolaan Air Irugasi Untuk Pertanian

a. Embung 5 Unit di Desa Liang Bunyu dan Desa Bambangan Kec. Sebatik Barat, Desa Binusan Kec. Nunukan
b. Sumur Resapan 12 Unit di Desa Binusan Kec. Nunukan Kel. Tanjung Harapan Sei. Buncang Kec. Nunukan Selatan
c. Optimasi lahan Perkebunan 90 Ha di Desa Binusan Kec. Nunukan Kel. Tanjung Harapan Sei. Buncang Kec. Nunukan Selatan

Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Kutai Kertanegara (Rp. 1.805.000.000,-) (80%)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi : :

- Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian
  a. Jalan Produksi 6 Km, tersebar di lokasi berikut : Desa Semangko Kec. Marangkayu 1 Km, Desa Suka Damai dan Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak 3 Km dan Kelurahan Karya Merdeka Kec. Samboja 2 Km
  b. Perluasan areal 150 Ha, tersebar di Desa Suka Damai Kec. Muara Badak 100 Ha, Desa Sumber Sari Kec. Sebulu 50 Ha
  c. Pembangunan Embung 2 Unit, tersebar di Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak 1 unit, Desa Amborawang Kec. Samboja 1 unit
  d. Pembangunan Sumur Resapan 14 Unit tersebar di Desa Badak Mekar Kec. Muara Badak 7 Unit, Desa Karya Merdeka Kec. Samboja 7 unit

Terdapat kegiatan konservasi lahan sebanyak 2 paket yang tidak dapat terealisasi disebabkan karena :

- Acuan pedoman teknis konservasi yang terlalu mengikat kelompok sasaran, dimana komponen konservasi tersebut terdapat komponen pembelian/belanja hewan ternak jenis kambing
- Padahal pada kegiatan sosialisasi ke kelompok sasarna/kelompok tani, masyarakat petani tidak ada yang menginginkan ternak kambing, petani hanya menginginkan ternak sapi. Tetapi didalam buku Pedoman Teknis konservasi lahan yang disusun oleh pusat mensyaratkan bahwa petani harus membeli kambing

Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Penajam Paser Utara (Rp. 1.350.000.000,-) (100 %)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi : :

- Perluasan Areal Perkebunan 200 ha di Desa Pemaluan Kec. Babulu dan Desa Maridan Kec. Sepaku
- Jalan Produksi 1 Km di Kelurahan Sepan Kec. Penajam

Satker Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau (Rp. 835.000.000,-) (100%)

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian meliputi : :

- Perluasan Areal Kebun Karet 100 Ha di Desa Kuala Lapang dan Desa Tanjung Lapang Kec. Malinau Barat, Desa Pulau Sapi Kec. Mentarang, Desa Setulung Kec. Malinau Selatan
- Pengembangan Jalan Produksi 4 Km di Desa Kuala Lapang Kec. Malinau Barat

BAB. V HAL LAIN-LAIN

Program Pengembangan Kebun Kelapa Sawit Sejuta Hektar

Seperti kita ketahui bersama, sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 – 2013 sektor perkebunan ditargetkan untuk dapat mengembangkan satu juta ha kelapa sawit dan 250.000 ha aneka tanaman lainnya. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur tiap tahunnya memberikan hasil yang menggembirakan, ini dapat dilihat dari peningkatan luas areal perkebunan di Kalimantan Timur dimana pada sampai tahun 2012 mencapai 831.818 Ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 287.709 Ha (9,15 %) Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII) seluas 17.937 Ha (13,52%) dan Perkebunan Besar Swasta seluas 526.172 Ha (68,73 %). Dari 330 perusahaan ijin lokasi dengan luas 3.702.839,08 Ha. Terdapat 113 perusahaan yang sudah HGU dengan luasan 936.428,65 ha. Realisasi tanam kebun inti 566.934,68 Ha dan plasma 120.911,44 serta sawit rakyat seluas 122.181 Ha yang seluruhnya mencapai total luas 810.027,12 Ha (Posisi s/d Desember 2012). Saat ini terdapat 28 unit Pabrik Minyak sawit yang sudah beroperasional tersebar di 6 Kabupaten (Kutim, Kukar, PPU, Paser, Berau dan Nunukan). Sedangkan pembangunan yang sedang berjalan sebanyak 10 unit Pabrik Minyak kelapa sawit (PMS) dan direncakan tahun 2012 ini bisa operasional. Pada tahun 2012 luas tanaman kelapa sawit mencapai 821.387,04 Ha dengan produksi sebesar 3.251.144 ton.

Program Revitalisasi Pembangunan Perkebunan

Program Revitalisasi perkebunan adalah upaya percepatan pengembangan perkebunan rakyat melalui perluasan, peremajaan dan rehabilitasi tanaman perkebunan yang didukung kredit investasi perbankkan dan subsidi bunga oleh pemerintah dengan melibatkan perusahaan dibidang usaha perkebunan sebagai mitra pengembangan dalam pembangunan kebun, pengolahan dan pemasaran hasil. Program revitalisasi perkebunan diarahkan pada 3 komoditi pilihan yaitu kelapa sawit, karet dan kakao. Pilihan terhadap 3 komoditi tersebut adalah dengan pertimbangan antara lain :

1. Komoditi yang dikembangkan mempunyai peranan yang sangat strategis sebagai sumber pendapatan petani / masyarakat.
2. Komoditi yang dikembangkan mempunyai prospek pasar baik pasar dalam negeri maupun pasar ekspor
3. Mampu menyerap tenaga kerja baru
4. Mempunyai peranan dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup

Data dari Departemen Pertanian menunjukan bahwa pengembangan 3 komoditi pilihan tersebut mampu menyerap tenaga kerja yang besar, secara keseluruhan di Indonesia pengembangan tanaman kelapa sawit menyerap 2,7 juta kepala keluarga (KK), pengembangan tanaman karet menyerap 1,4 juta Kepala keluarga (KK) dan pengembangan tanaman kakao mampu menyerap 500.000 kepala keluarga (KK). Di Kalimantan Timur upaya pengembangan komoditas perkebunan masih dihadapkan pada berbagai kendala, yaitu diantaranya :

a. Produktivitas tanaman yang masih rendah karena banyak tanaman yang sudah tua dan rusak dengan penggunaan bahan tanaman yang asalan
b. Tingginya suku bunga komersil
c. Industri hilir yang kurang berkembang sehingga sebagian besar ekspor masih dalam bentuk primer
d. Tidak adanya pendanaan khusus seperti KKPA untuk sub sektor perkebunan

e. Adanya berbagai kebijakan yang kurang mendukung pembangunan perkebunan seperti diberlakukannya pungutan pajak dan lain-lain yang memberatkan iklim investasi
f. Lemahnya permodalan yang dimiliki petani

Program revitalisasi perkebunan pola pengembangan yang dilakukan adalah untuk perkebunan rakyat melalui kemitraan baik pola PIR maupun kemitraan lainnya. Untuk wilayah yang tidak tersedia mitranya dimungkinkan pengembangan dilakukan langsung oleh petani pekebun dengan pembinaan oleh jajaran Departemen Pertanian dan dinas yang membidangi perkebunan di provinsi maupun kabupaten / kota.

Pelaksanaan Program Revitalisasi Perkebunan

1. Berbagai macam kendala yang menghambat dalam pelaksanaan revitalisasi perkebunan antara lain kurangnya pemahaman terhadap program revitalisasi, sulitnya akses petani untuk memenuhi persyaratan perbankkan, tingkat bunga kredit yang masih tinggi, tata ruang yang belum mantap. Lahan petani yang belum bersertifikat kondisi infrastruktur yang kurang memadai dan kurangnya perusahaan inti yang layak menjadi avalis.
2. Dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program revitalisasi perkebunan diperlukan adanya political will dan financial will dari pemerintah daerah provinsi dan kebupaten / kota melalui (a) Penetapan Bank Kaltim sebagai Bank pelaksana program (b) Mengalokasi dana APBD provinsi dan kabupaten / kota untuk dukungan pembiayaan sehingga beban kredit untuk pengembangan perkebunan rakyat menjadi lebih ringan seperti bantuan untuk kegiatan sertifikasi lahan, pengadaan bibit dan lain-lain.
3. Pembangunan perkebunan secara nyata telah memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, penyerapan tenaga kerja, kelestarian lingkungan dan pengembangan wilayah. Oleh karena itu sentra-sentra perkebunan yang telah dibangun seperti PRPTE, TCSSP, PIR – Swadaya dan lain-lain perlu diinventarisir dan dikelola kembali dengan baik serta diberikan dukungan pembiayaan untuk pemeliharaan dan pengembangan selanjutnya secara berkesinambungan sumber dana APBD II, APBD I, APBN dan sumber pembiayaan lainnya.

Upaya percepatan Program Revitalisasi Perkebunan

- Memberikan pemahaman Program Revitalisasi Perkebunan kepada seluruh pihak terkait, secara khusus terhadap lembaga keuangan daerah untuk lebih berperan dalam pemahaman bahwa perkebunan merupakan bisnis jangka panjang dengan basis bisnis yang solid
- Perlunya komitmen dan konsistensi dari semua pihak dalam pemenuhan persyaratan pembiayaan revitalisasi perkebunan
- Koordinasi antara instansi pemda, terutama untuk penetapan petani dan perusahaan mitra, RTRW dans ertifikasi lahan
- Perusahaan mitra, koperasi dan petani peserta secara proaktif segera melengkapi persyaratan administrasai dan segera mengajukan permohonan KPEN RP ke Bank
- Lahan petani yang belum memiliki sertifikat perlu adanya kepastian status kepemilikan

Pelaksanaan Program GERNAS Kakao

Perkembangan kakao di Indonesia sebenarnya tidak dapat dilepaskan dari program besar pada tahun 1980-an, yang dikenal dengan Proyek Rehabilitasi dan Peremajaan Tanaman Ekspor (PRPTE). Pada waktu itu Indonesia berkepentingan untuk mencari dan mengembangkan komoditas ekspor non-migas, sekaligus untuk mengantisipasi penurunan produksi dan ekspor minyak dan gas bumi, yang menunjukkan tanda-tanda kejenuhan. Kakao tumbuh pesat pada dekade 1990-an dan menjadikan Indonesia sebagai eksportir ketiga terbesar di dunia, setelah Pantai Gading dan Ghana. Petani kakao di Indonesia sekarang diperkirakan berjumlah 1.4 juta rumah tangga, umumnya berskala kecil, sekitar 2 hektar atau kurang, sekalipun di luar Jawa. Kenaikan harga kakao yang sangat tinggi pada saat terjadinya krisis ekonomi pada akhir 1990-an benar-benar telah membawa berkah tersendiri bagi petani kakao, terutama di Indonesia Timur. Tidak berlebihan untuk dikatakan bahwa kakao di Indonesia telah berkontribusi signifikan pada pengentasan kemiskinan, terutama di kawasan pedesaan.

Walaupun demikian, permasalahan yang menimpa usahatani, sistem produksi dan industri kakao secara umum juga mulai bermunculan, terindikasi dari fluktuasi dan bahkan stagnansi produksi dan ekspor kakao pada dekade sekarang ini setelah 20 tahun terjadinya peningkatan.

Masalah yang dihadapi petani kakao Indonesia adalah : a) serangan hama dan penyakit; b) penurunan tingkat produktivitas; c) rendahnya kualitas biji kakao yang dihasilkan karena praktek pengelolaan usahatani yang kurang baik maupun sinyal pasar dari rantai tataniaga yang kurang menghargai biji bermutu; d) tanaman sudah tua; dan e) pengelolaan sumber daya tanah yang kurang tepat.

Kekhawatiran dan sikap antisipatif segenap pemangku kepentingan kakao terhadap tragedi kehancuran yang menimpa industri kakao di Brazil dan Malaysia perlu dihargai karena hama dan penyakit yang menyerang kakao Indonesia sangat mirip dengan yang terjadi di Brazil dan Malaysia. Kakao Brazil hancur karena serangan 'Witches Broom' pada akhir 1980an, yang disebabkan jamur patogen *Crinipellis perniciosa* dan *Moniliopthora roren*. Sementara, kakao Malaysia nyaris habis total karena serangan penggerek buah kakao (PBK) yang disebabkan oleh serangga *Conopomorpha cramerella*. Berbagai macam hama dan penyakit juga dijumpai di Indonesia, terutama karena pohon kakao yang berusia tua dan penanganan usahatani yang kurang memadai. Selain hama PBK yang sangat ganas, penyakit dan hama kakao lain juga banyak ditemukan di Indonesia, misalnya *Phytophthora palmivora* yang menyebabkan busuk buah, busuk batang (*Helopeltis spp*), penggerek batang (*Zeuzera spp*), dan jamur perusak pembuluh batang atau dikenal dengan vascular-streak dieback (VSD) yang disebabkan oleh jamur *Oncobasidium theobromae*.

Stagnansi dan bahkan penurunan produksi kakao yang terjadi di Indonesia sejak tahun 2003, tentu diperhatikan dengan seksama karena hal tersebut justru terjadi bersamaan dengan peningkatan areal tanam yang signifikan, yang tentu saja berimplikasi penurunan produktivitas kakao nasional. Di beberapa daerah, bahkan perluasan areal kakao Indonesia berkaitan dengan penurunan areal hutan atau deforestasi. Sehingga tanpa perhatian dari berbagai pihak, kejadian yang menimpa Brazil dan Malaysia dapat saja menimpa Indonesia. Sektor kakao Indonesia masih memerlukan intervensi dari pemerintah, swasta dan masyarakat perkakaoan umumnya, agar Indonesia tetap berkibar dalam kancah ekonomi kakao di tingkat global.

Menyadari besar dan kompleksnya persoalan perkakaoan Indonesia, pemerintah Sulawesi Barat (Sulbar) yang sebagian besar penduduknya hidup dan bergantung pada produksi kakao, mengambil inisiatif untuk fokus pada kakao dalam program pembangunannya. Pemerintah Sulbar pada 31 Juli 2007 mencanangkan program yang disebut 'Gerakan Pembaharuan Kakao (GPK) Sulbar' sebagai lokomotif pembangunan berbasis kerakyatan. GPK merupakan program terpadu yang holistik, melibatkan berbagai stakeholder dengan tujuan meningkatkan produktivitas dan mutu kakao serta profitabilitas petani kakao (terkait dengan pengentasan kemiskinan), mendorong pertumbuhan perdagangan dan industri kakao dan menjadikan kakao sebagai lokomotif pembangunan Sulbar. Diperlukan dana yang besar dan keterlibatan berbagai pihak untuk menyukseskan GPK. Karena itu, Pemerintah Provinsi Sulbar melakukan berbagai usaha untuk meyakinkan dan memohon dukungan pendanaan dari Pemerintah Pusat yang akhirnya berbuah dalam bentuk GERNAS Peningkatan Produksi dan Mutu Kakao ini yang dicanangkan Wakil Presiden RI di Mamuju, 10 Agustus 2008.

Di tingkat administrasi pemerintahan, Program Gerakan Revitalisasi Kakao Nasional (GERNAS Pro-Kakao) diumumkan oleh Departemen Pertanian, atau tepatnya Direktorat Jenderal Perkebunan pada tanggal 18 Juli 2008 yang didukung oleh pemangku kepentingan (*stakeholders*) sektor kakao di Indonesia. Wakil Presiden M. Jusuf Kalla secara resmi menetapkan GERNAS tersebut pada tanggal 10 Agustus 2008 di Mamuju Sulawesi Barat. Acara pencanangan ini diikuti oleh pernyataan kesiapan empat Gubernur se-Sulawesi, yaitu Sulawesi Selatan, Barat, Tengah dan Tenggara untuk menjadi penanggung jawab GERNAS di wilayahnya masing-masing. GERNAS yang secara resmi akan beroperasi pada periode tahun 2009-2012 ini, kemudian diperluas hingga juga mencakup lima provinsi lain di Indonesia Timur, yaitu Nusa Tenggara Timur, Bali, Maluku, Papua Barat dan Papua.

Menurut Direktur Tanaman Rempah dan Penyegar Direktorat Jenderal Perkebunan, anggaran Program GERNAS ini diperkirakan mencapai Rp 13,7 triliun, termasuk Rp 2,5 triliun yang dialokasikan langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Beberapa kegiatan dalam GERNAS antara lain : (1) Peremajaan tanaman yang rusak berat seluas 70 ribu ha, (2) Rehabilitasi tanaman yang rusak sedang seluas 235 ribu ha, (3) Intensifikasi tanaman yang kurang dipelihara seluas 145 ribu ha, (4) Pemberdayaan 450 ribu petani (termasuk pelatihan pengendalian hama dan penyakit), (5) Penyediaan dan pelatihan tenaga pendamping sebanyak 360 orang, (6) Pembangunan empat unit stasiun penelitian serta penguatan / pembangunan tujuh unit laboratorium lapangan dan (7) Perbaikan mutu sesuai dengan standar mutu dalam Standar Nasional Indonesia (SNI).

Sembilan komponen Program GERNAS yang memerlukan perhatian khusus, dari tingkat perencanaan sampai implementasi Program GERNAS adalah :

1. Pendataan : Perlu sistem manajemen informasi yang efektif, interaktif, terbuka dan dinamis dan melibatkan semua stakeholder.
2. Pengadaan bibit unggul berbasis klonal : Perlu perencanaan yang matang dan melibatkan berbagai stakeholder untuk menjamin pengadaan bibit unggul yang bersertifikat sebanyak minimal 6 klon. Bibit ini bisa berasal baik dari hasil pengembangan *somatic embryogenesis* (SE) maupun dari klon sambung pucuk yang diproduksi dengan model pembibitan usaha petani dan kelompok tani dengan memperhatikan kelebihan/kekurangan resiko pengembangannya.
3. Penyediaan teknologi yang tepat : Pelaksanaan program GERNAS perlu memberdayakan sumber daya lokal (universitas dan lembaga penelitian) secara terkoordinasi dan bersinergi dengan memperhatikan kondisi spesifik lokasi, termasuk kondisi tanah dan kebutuhan drainase. Informasi mengenai kelayakan lahan, termasuk hasil analisis tanah, perlu diketahui dengan baik sebelum kegiatan peremajaan dan rehabilitasi dimulai. Teknologi budidaya yang tepat harus diterapkan oleh petani di bawah bimbingan pendamping terlatih. Perlu kejelasan mengenai kegiatan riset di empat sub-stasiun. Menurut CSP, sebaiknya ini difokuskan kepada i) pengembangan dan pengujian klon unggul, dan ii) menyediakan informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pendamping lapangan (sebagai *resource centre*).
4. Rekrutmen dan pelatihan pendamping lapangan : Tenaga pendamping lapangan sangat penting untuk mendukung kesuksesan dan keberlanjutan GERNAS sehingga rekrutmen dan pelatihan tenaga pendamping perlu mendapatkan prioritas. Diperkirakan, 450 orang tenaga pendamping harus dilatih khusus untuk mendukung GERNAS. Pelatihan ini seharusnya melalui suatu modul pelatihan terpadu dengan memanfaatkan segenap sumberdaya yang tersedia, dan dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan paket teknologi yang tepat dan konsisten.
5. Sistem usahatani kakao yang berkelanjutan : GERNAS perlu secara eskplisit menyebutkan pentingnya mengembangkan suatu industri kakao yang benar-benar berkelanjutan. Hal ini memerlukan definisi dan ruang lingkup 'berkelanjutan' yang jelas dalam konteks perkakaoan, mulai dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial sampai pada kelestarian sumberdaya lahan, hutan, air dan keanekaragaman hayati umumnya. Dalam hal ini, ada beberapa unsur penting yang harus diperhatikan termasuk peran pohon pelindung, perawatan dan konservasi tanah, pengendalian kerusakan hutan, pengendalian hama terpadu dan diversifikasi usahatani kakao.

6. Kebijakan pemerintah : Perlu dukungan kebijakan dan peraturan pemerintah yang berpihak kepada petani secara konsisten, termasuk penerapan SNI dan sistem pengawasan mutu. Dalam hal ini, pemerintah perlu memperhatikan dan memperbaiki infrastruktur pembangunan, sistem insentif bagi petani untuk meningkatkan produktivitas dan mutu kakao dan bukannya membebani petani dengan pajak, retribusi dan pungutan lain yang memberatkan. Pembangunan infrastruktur yang penting misalnya adalah perbaikan jalan yang menghubungkan petani dengan pasar dan pembuatan drainase dimana diperlukan.
7. Program kredit petani : Perlu ada reformasi sektor perbankan, lembaga pertanahan dan prosedur administrasi organisasi petani yang mampu menjamin akses petani kepada lembaga pembiayaan. Perlu dicari model mikro-kredit inovatif yang mampu menghubungkan kelompok tani dengan bank secara berkelanjutan. Tanpa inovasi dan reformasi tersebut, petani akan tetap menghadapi kesulitan dalam hal perkreditan.
8. Pemantauan dan Evaluasi : Perlu sistem pemantauan dan evaluasi (MONEV) yang kredibel, transparan dan teliti, dengan tanggung jawab yang jelas.
9. GERNAS Action Plan : Koordinasi intensif dan diskusi lebih lanjut diperlukan untuk menghasilkan sebuah *Action Plan* dengan perincian kegiatan yang akan dilakukan dibawah program GERNAS. *Action Plan* ini harus mengidentifikasikan tanggung jawab setiap stakeholder yang akan dilibatkan. Keberhasilan Program GERNAS tergantung pada kerja keras semua stakeholder yang berkomitmen untuk membangun sebuah industri perkakaoan yang makmur dan berkelanjutan. Industri kakao Indonesia berpotensi untuk dijadikan contoh model kemitraan swasta dengan pemerintah (*public-private partnership*) yang berhasil dan diikuti oleh sektor pertanian lain di Indonesia. Dalam rangka menyukseskan GERNAS, harus ada *Action Plan* yang menentukan kewajiban dan tanggung jawab semua stakeholder, khususnya dari pemerintah dan pihak swasta. Tabel berikutnya adalah langkah awal untuk memulaikan proses ini demi kepentingan masa depan industri kakao Indonesia.

BAB. VI PERMASALAHAN

A. Permasalahan

Adapun tantangan dan permasalahan yang ditemui dalam pengembangan perkebunan rakyat melalui Pola PIR Swadaya adalah sebagai berikut :

1. Pada tahun 2012 pengadaan untuk bibit karet tidak terserap secara keselurah hal ini disebabkan karena kontraktor tidak bisa memenuhi semua kebutuhan karet yang diperlukan (kontraktor wan prestasi)

2. Kemampuan tehnis budidaya, wirausaha dan manajemen petani masih rendah. Hal ini disebabkan karena lokasi pengembangan yang terpilih masih merupakan wilayah yang baru dibuka yang selama ini usahanya bukan tanaman kelapa sawit.
3. Seleksi dan penetapan CPCL pada wilayah pengembangan baru dilakukan oleh petugas Lapangan mengalami keterlambatan karena sosialisasi ke masyarakat harus dilaksanakan berulang kali untuk memastikan lahan-lahan kebun adalah milik masyarakat, tidak tumpang tindih dan lahannya dalam satu hamparan.
4. Para Petugas Lapangan (PPL) Swadaya dan tahapan-tahapan pengembangannya sehingga sebagian petani peserta belum sepenuhnya paham dengan program.
5. Dalam distribusi bantuan petani masih belum disertai dengan pendampingan yang maksimal melalui konsep pola pemberdayaan petani (sistem kebersamaan ekonomi) sehingga dikhawatirkan pengelolaan bantuan oleh petani belum dilakukan secara maksimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan yang terjadi di UPTD P2TP diantaranya adalah :

1. Kurangnya Pemanfaatan agens Pengendali Hayati oleh petani;
2. Kontinuitas Penyampaian laporan perkembangan OPT dari Kab / Kota sering terlambat;
3. Ketersediaan SDM di Bidang Teknis Pengendalian OPT dirasakan masih kurang serta masih belum optimalnya kinerja dari petugas;
4. Luasnya cakupan wilayah kegiatan sehingga tidak semua lokasi sebaran sentra-sentra produksi perkebuan terutama perkebunan rakyat di Kalimantan Timur dapat terjangkau dan teridentifikasi penyebaran hama, penyakit dan gulmanya;
5. Keterbatasan infrastruktur terutama akses jalan menuju ke lokasi kebun sangat menghambat pelaksanaan kegiatan pengendalian OPT;

Permasalahan yang sering dihadapi dilapangan untuk pelaksanaan kegiatan Ditjenbun/Gernas Kakao adalah :

1. Untuk pelaksanaan pembibitan, khususnya proses aklimatisasi/pembesaran bibit kakao somatic embryogenesis (SE), kendala yang ada adalah karena pembesaran masing – masing dilaksanakan pada kabupaten maka proses pengawasan terutama dari Pihak Satker mengalami kendala hal ini disebabakan karena terbagi dalam 3 wilayah kabupaten.
2. Untuk proses pembongkaran/penebangan pohon kakao yang dimasukkan dalam program peremajaan, rata - rata pemilik kebun/petani peserta masih ada rasa sayang untuk membongkar/menebang tanaman kakao yang akan diganti dengan tanaman baru (bibit yang berasal dari bibit SE).
3. Kendala dalam proses pemangkasan tanaman untuk program intensifikasi juga masih ada dikarenakan rata - rata tanaman yang akan dipangkas masih memiliki buah kakao sehingga oleh petani pemilik kebun baru dilakukan pemangkasan tanaman setelah buah dipanen;
4. Masalah pemetaan untuk membuat database sering terhambat, hal ini disebabkan karena lokasi kegiatan yang akan dipetakan masih menyebar (tidak berada dalam satu hamparan), disamping itu juga karena keterbatasan SDM petugas yang ada di Kabupaten terutama dalam hal penggunaan alat navigasi pemetaan (GPS);

5. Penanaman bibit dilapangan dibeberapa kelompok tani mengalami keterlambatan, hal ini terjadi karena sampai dengan bulan Januari biasanya petani masih bekerja mengusahakan padi ladang, sehingga penanaman bibit kakao SE agak terlambat.

B. Upaya Penyelesaian Masalah

1. Pengembangan kapasitas dan kesiapan penangkar- penagkar bibit lokal yang dengan lokasi pengembangan sehingga di dalam penyiapan bibit kelapa sawit dan karet diharapakan pihak ketiga dapat membeli dari penangkar penagkar tersebut.
2. Perencanaan penyiapan bibit tanaman kelapa sawit dan karet dilapangan disesuikan dengan kebutuhan bibit untuk pengembangan setiap bulan.
3. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) petani melalui pelatihan pelatihan dan kunjungan belajar untuk meningkatkan kemampuan tehnis dan manajemen kelompok tani kelapa sawit dan karet sehingga dilapangan terlaksana dengan baik.
4. Usulan calon petani dan calon lahan pengembangan perkebunan kelapa sawit dan karet rakyat dari Dinas Perkebunan Kabupaten.
5. Peningkatan kemampuan petugas lapangan (PPL) melalui pembinaan dan pelatihan, pertemuan-pertemuan tehnis PIR Swadaya.
6. Mekanisme penyusunan anggaran selalu dihadiri oleh instansi yang membidangi panggar eksekutif dan komisi legislatif bersama dengan yang mengajukan anggaran baik secara formal maupun informal.
7. Setiap pemberian bantuan petani agar selalu disertai dengan pelatihan dan pendampingan manajemen kelompok (sistim pengelolaan bantuan yang diterima)
8. Pembinaan dan pendampingan kepada kelompok tani terus diupayakan untuk kelancaran dalam pembuatan RUK (Rencana Usaha kelompok), SPK, RDK dan RDKK dalam rangka perkembangan kelompok tani
9. Penetapan jadwal pertemuan Pembina, PPL dan Petani PIR di wilayah Pengembangan masing – masing Kecamatan minimal dilakukan 1 (satu) kali dalam setiap bulan, untuk memacu kegiatan penanaman dalam mengatasi berbagai kendala di lapangan.
10. Komitmen pembiayaan pemeliharaan kelapa sawit dan karet dari APBD II Kabupaten Kutai Kertanegara, Kota Samarinda, Bulungan dan Kutai Timur perlu ditingkatkan untuk menopang kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit dan karet yang terbatas anggarannya dari APBD I Kalimantan Timur.
11. Meningkatkan sosialisasi pemanfaatan agens pengendali hayati kepada petugas dan petani.
12. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi ke dinas yang membidangi Perkebunan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Timur.
13. Berkoordinasi dengan Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Timur untuk pertambahan pegawai.
14. Merencanakan peningkatan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan bagi petugas untuk menunjang peningkatan SDM.
15. Perlu adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten kepada petani peserta seperti adanya dukungan pendanaan dalam pelaksanaan operasional lapangan.
16. Waktu pelaksanaan dalam hal pengadaan sarana produksi (bibit, pupuk, pestisida dan fungsida) sangat berpengaruh besar dalam jadwal di lapangan, terutama permasalahan pengadaan bibit sebagai salah satu faktor kunci keberhasilan program Gernas kakao.

BAB. VII PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Timur tahun 2009 – 2013 sektor perkebunan ditargetkan untuk dapat mengembangkan satu juta ha kelapa sawit dan 250.000 ha aneka tanaman lainnya. Perkembangan perkebunan di Kalimantan Timur tiap tahunnya memberikan hasil yang menggembirakan, ini dapat dilihat dari peningkatan luas areal perkebunan di Kalimantan Timur dimana pada sampai tahun 2012 mencapai 831.818 Ha yang terdiri dari Perkebunan Rakyat seluas 287.709 Ha (9,15 %) Perkebunan Besar Negara (PTPN XIII) seluas 17.937 Ha (13,52%) dan Perkebunan Besar Swasta seluas 526.172 Ha (68,73 %)
2. Perusahaan Perkebunan Besar Swasta (PBS) yang ada di Kalimantan Timur sampai dengan tahun 2012 telah mencapai 330 perusahaan dengan luas perusahaan yang memiliki ijin lokasi adalah 3.702.839,08 Ha dan perusahaan yang telah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) 113 perusahaan dengan luas 936.428,65 Ha. Realisasi penanaman Perkebunan Inti 566.934,68 Ha, dan Perkebunan Plasma (untuk petani) 120.911,44 Ha jumlah KK sebanyak 57.120.
3. Perkembangan Perkebunan Kelapa Sawit rakyat melalui Kegiatan PIR Swadaya dan Kemitraan pada Tahun Anggaran 2012 (APBD Murni dan Perubahan) melaksanakan pengembangan kelapa sawit rakyat seluas 1.000 Ha pada wilayah Kec. Samboja, Muara Badak, Loa Kulu, Muara Badak dan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kabupaten Berau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Penajam Paser Utara. Pengembangan Karet Rakyat seluas 525 Ha terealisasi hanya 28 Ha (14.000 bibit) dikarenakan penyaluran bibit yang tidak sesuai target oleh pihak kontraktor untuk wilayah Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara di bagi dalam 8 kelompok tani. Pengembangan Kakao seluas 200 Ha dilaksanakan pada wilayah Kecamatan Barong Tongkok, Kecamatan Bongan, Kecamatan Long Hubung dan Kecamatan Long Bagun Kabupaten Kutai Barat sedangkan Kabupaten Kutai Timur terdapat di Kecamatan Busang. Pengembangan Kelapa Dalam seluas 75 Ha pada wilayah Kelurahan Makroman Samarinda Ilir Kota Samarinda, Kelurahan Handil Baru Kecamatan Samboja Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur Kota Balikpapan.

B. Saran

1. Dalam rangka mendukung Tahun 2012 yang dicanangkan oleh Bapak Gubernur Kalimantan Timur sebagai Tahun Peningkatan Kinerja dan Prestasi, maka perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang harus diutamakan.
2. Dengan diperolehnya dokumen usaha perkebunan terhadap perkebunan besar swasta, hendaknya dapat dimonitor realisasi kinerja pembangunan kebunnya, baik rencana pembangunan kebun inti maupun kebun plasma. Dalam rangka pembinaan kinerja usaha perkebunan swasta/Negara perlu dibentuk Tim Penilaian Usaha Perkebunan yang akan melakukan sosialisasi dan metode pelaksanaannya. Sistem penetapan nilai upah minimum sub sector perkebunan untuk tingkat Provinsi Kaltim hendaknya dilakukan tahapan survey, koordinasi dengan Kabupaten/Kota hingga penetapan melalui SK Gubernur.
3. Untuk kegiatan penanaman kelapa sawit, karet, kakao dan kelapa dalam pola PIR Swadaya dan kemitraan perkebunan pada tahun pertama hendaknya dibiayai dari dana APBD I sedangkan pemeliharaan tanaman lanjutan pada masing – masing wilayah diharapkan dibiayai dari APBD II Kabupaten/Kota.

4. Pola pembiayaan dalam pengembangan PIR Swadaya kelapa sawit, karet, kakao dan kelapa dalam pada tahun 2012 melalui kontraktual/Pihak ketiga, diperlukan kesiapan Pembina, PPL dan Kelompok – kelompok tani dalam pembinaan administrasi evaluasi kegiatan dan mekanisme laporan yang secara intensif dan berkesinambungan.